

Makna di Balik Narasi Sampah Bali: Kajian Cyberpragmatics dalam Diskursus Media Sosial

I Ketut Suar Adnyana

Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia,  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Dwijendra

Email: [suara6382@gmail.com](mailto:suara6382@gmail.com)

Abstrak

**Abstrak**

Penelitian ini mengkaji bagaimana makna dibangun dan dinegosiasikan dalam diskursus digital mengenai isu sampah di Bali, dengan fokus pada strategi pragmatik, (ketidak)santunan berbahasa, serta relasi kuasa yang terlibat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam kerangka cyberpragmatics dengan data berupa komentar pengguna media sosial dari platform TikTok, Instagram, dan X. Analisis dilakukan dengan mengintegrasikan teori implikatur Grice, teori kesantunan Brown dan Levinson, teori ketidaksantunan Culpeper, serta Analisis Wacana Kritis yang dikembangkan oleh Norman Fairclough. Hasil penelitian menunjukkan bahwa makna dalam diskursus digital bersifat dinamis, tidak linear, dan tidak sepenuhnya ditentukan oleh teks, melainkan terbentuk melalui proses interaksi dan inferensi antar pengguna. Strategi pragmatik seperti implikatur, ironi, sarkasme, dan ketidaksantunan berbahasa digunakan tidak hanya untuk menyampaikan makna evaluatif, tetapi juga untuk membangun posisi sosial, mengekspresikan emosi, dan menarik keterlibatan audiens. Ketidaksantunan berbahasa tidak semata-mata merupakan pelanggaran norma, tetapi berfungsi sebagai strategi komunikatif untuk menyampaikan kritik sosial, memperkuat ekspresi emosional, serta mendelegitimasi pihak tertentu. Lebih lanjut, diskursus digital menunjukkan adanya kontestasi makna yang mencerminkan relasi kuasa dan ideologi. Melalui perspektif Analisis Wacana Kritis, bahasa tidak hanya merepresentasikan realitas, tetapi juga berperan dalam membentuk dan mereproduksi struktur sosial, termasuk identitas dan posisi ideologis pengguna. Batas antara kesantunan dan ketidaksantunan menjadi semakin kabur dalam konteks komunikasi digital yang ditandai oleh anonimitas, multimodalitas, dan interaktivitas. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian pragmatik digital dengan menunjukkan kompleksitas hubungan antara bahasa, makna, dan dinamika sosial dalam ruang digital. Selain itu, penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi pendekatan pragmatik dan kritis untuk memahami praktik komunikasi kontemporer di media sosial.

**Kata Kunci:** Cyberpragmatics; diskursus digital; (ketidak)santunan; implikatur; sarkasme; Analisis Wacana Kritis; relasi kuasa; ideologi; media sosial; negosiasi makna

**Abstract**

**Abstract**

This study examines how meaning is constructed and negotiated in digital discourse surrounding the issue of waste in Bali, with particular attention to pragmatic strategies, (im)politeness, and power relations. Adopting a qualitative approach within a cyberpragmatics framework, the data consist of user comments collected from social media platforms, including TikTok and Instagram. The analysis integrates Gricean

implicature, Brown and Levinson's politeness theory, Culpeper's impoliteness framework, and Critical Discourse Analysis as developed by Norman Fairclough. The findings reveal that meaning in digital discourse is inherently dynamic, non-linear, and underdetermined, emerging through interactive and inferential processes rather than being explicitly encoded in texts. Users employ a range of pragmatic strategies—such as implicature, irony, sarcasm, and impoliteness—not only to convey evaluation but also to manage social positioning, express emotions, and engage audiences. Notably, impoliteness functions not merely as a violation of linguistic norms but as a strategic resource for social criticism, emotional intensification, and delegitimization of authority. Furthermore, the study demonstrates that digital discourse serves as a site of ideological contestation where multiple interpretations compete for dominance. Through the lens of Critical Discourse Analysis, language is shown to both reflect and reproduce power relations, ideological stances, and identity constructions. The boundary between politeness and impoliteness becomes increasingly blurred, shaped by the affordances of digital communication such as anonymity, multimodality, and interactivity. This study contributes to the growing field of digital pragmatics by highlighting the complex interplay between language, meaning-making, and social dynamics in online environments. It also underscores the importance of integrating pragmatic and critical approaches to better understand how contemporary public discourse is shaped and negotiated in digital spaces.

**Keywords:** Cyberpragmatics; digital discourse; (im)politeness; implicature; sarcasm; Critical Discourse Analysis; power relations; ideology; social media communication; meaning negotiation

## I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Persoalan sampah di Bali telah lama menjadi isu krusial yang tidak hanya berdampak pada kualitas lingkungan, tetapi juga pada citra sosial, ekonomi, dan budaya pulau tersebut sebagai destinasi pariwisata global. Produksi sampah yang terus meningkat, lemahnya sistem pengelolaan, serta ketimpangan antara pertumbuhan pariwisata dan kapasitas infrastruktur lingkungan telah memicu krisis ekologis yang kompleks. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, isu ini tidak lagi hanya hadir dalam ruang fisik, melainkan juga berkembang secara intens dalam ruang digital, terutama melalui media sosial seperti TikTok dan Instagram

Transformasi isu sampah dari realitas material ke wacana digital menunjukkan adanya pergeseran penting dalam cara masyarakat memahami, merespons, dan membingkai persoalan lingkungan. Media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyebaran informasi, tetapi juga sebagai arena diskursif tempat makna diproduksi, dinegosiasikan, dan dipertentangkan. Dalam konteks ini, komentar pengguna menjadi representasi praktik bahasa yang sarat dengan kepentingan ideologis, emosi kolektif, serta posisi sosial tertentu (Khosravini, 2022).

Masalah utama yang muncul bukan sekadar banyaknya percakapan tentang sampah Bali di media sosial, melainkan bagaimana makna dari isu tersebut dibangun secara tidak langsung melalui strategi pragmatik seperti implikatur, ironi, sarkasme, dan ujaran

ketidaksantunan. Fenomena ini menunjukkan bahwa komunikasi digital sering kali tidak bersifat literal, sehingga pemaknaan memerlukan pemahaman konteks yang lebih luas, termasuk relasi kuasa, identitas kelompok, dan ideologi yang melatarbelakanginya. Tanpa analisis yang memadai, makna-makna implisit ini berpotensi disalahpahami atau bahkan memperkuat polarisasi sosial (Yus, 2011).

Interaksi digital mengenai isu sampah di Bali juga memperlihatkan adanya fragmentasi opini publik yang tajam. Polarisasi ini tidak hanya mencerminkan perbedaan perspektif terhadap persoalan lingkungan, tetapi juga mengindikasikan adanya pertarungan narasi antara kelompok-kelompok tertentu, seperti masyarakat lokal, wisatawan, aktivis lingkungan, dan pemerintah. Dalam situasi ini, bahasa menjadi alat untuk membangun legitimasi, menyerang pihak lain, sekaligus memperkuat identitas kolektif.

Di sisi lain, kajian tentang isu lingkungan di Bali selama ini cenderung berfokus pada aspek ekologis, kebijakan, dan perilaku masyarakat, sementara dimensi linguistik khususnya dalam konteks komunikasi digital masih relatif kurang mendapat perhatian. Padahal, pemahaman terhadap bagaimana isu ini dikonstruksi secara diskursif di ruang digital sangat penting untuk merumuskan strategi komunikasi publik yang efektif dan berbasis konteks sosial.

Berdasarkan hal tersebut, diperlukan pendekatan yang mampu mengungkap kompleksitas makna dalam komunikasi digital, salah satunya melalui perspektif *cyberpragmatics*. Perspektif ini memungkinkan analisis yang lebih mendalam terhadap bagaimana makna diinterpretasikan dalam interaksi daring yang bersifat multimodal dan kontekstual. Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk menjembatani kesenjangan antara kajian pragmatik dan isu lingkungan, sekaligus memberikan kontribusi terhadap penguatan literasi digital masyarakat.

## 1.2 State of the Art

Penelitian mengenai isu sampah di Bali umumnya berfokus pada aspek pengelolaan lingkungan, perilaku masyarakat, serta kebijakan publik. Studi-studi tersebut menyoroti problematika struktural seperti keterbatasan infrastruktur, rendahnya kesadaran masyarakat, dan dampak pariwisata massal terhadap peningkatan volume sampah. Di sisi lain, kajian tentang media sosial lebih banyak menitikberatkan pada analisis sentimen, framing media, atau penyebaran informasi.

Dalam ranah linguistik, khususnya pragmatik, penelitian yang mengkaji komunikasi digital telah berkembang melalui pendekatan *cyberpragmatics* yang menekankan pada interpretasi makna dalam konteks interaksi daring. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa komunikasi di media sosial ditandai oleh penggunaan implikatur, ironi, dan strategi kesantunan yang berbeda dibandingkan komunikasi tatap muka. Selain itu, aspek multimodal seperti emoji dan gambar juga menjadi elemen penting dalam pembentukan makna.

Namun demikian, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang cukup signifikan, yaitu minimnya kajian yang mengintegrasikan analisis pragmatik digital dengan isu lingkungan lokal, khususnya dalam konteks Bali. Penelitian yang secara spesifik mengkaji bagaimana makna tentang isu sampah dikonstruksi, dinegosiasikan, dan dipolitisasi dalam ruang digital masih sangat terbatas.

Kajian ini berada pada irisan antara kajian pragmatik digital (*cyberpragmatics*), analisis wacana, dan isu lingkungan, yang hingga saat ini belum banyak dieksplorasi secara komprehensif.

### **1.3 Novelty (Kebaruan Penelitian)**

Kebaruan kajian ini terletak pada beberapa aspek berikut:

1. Integrasi lintas disiplin: Menggabungkan kajian *cyberpragmatics* dengan isu lingkungan lokal (sampah di Bali), yang sebelumnya jarang dilakukan.
2. Fokus pada makna implisit: Kajian ini tidak hanya menganalisis isi komentar secara eksplisit, tetapi juga menggali makna implikatur, ironi, sarkasme, dan strategi ketidaksantunan dalam komunikasi digital.
3. Pendekatan multimodal: Kajian ini menganalisis peran elemen non-verbal seperti emoji dan simbol visual dalam pembentukan makna.
4. Analisis relasi kuasa dan identitas: Relasi bahasa dan kuasa untuk mengungkap bagaimana bahasa digunakan untuk membangun ideologi, polarisasi, dan identitas kelompok dalam diskursus digital.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana makna tentang isu sampah di Bali dibangun dan dinegosiasikan dalam komentar pengguna media sosial?
2. Apa saja strategi pragmatik (implikatur, ironi, sarkasme, dan ketidaksantunan) yang digunakan dalam diskursus tersebut?
3. Bagaimana peran elemen multimodal (emoji, simbol visual) dalam memperkuat atau mengaburkan makna?
4. Bagaimana polarisasi opini mencerminkan relasi kuasa, ideologi, dan identitas kelompok dalam masyarakat digital?

### **1.5 Tujuan Khusus Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis konstruksi dan negosiasi makna dalam diskursus digital mengenai isu sampah di Bali.
2. Mengidentifikasi dan menjelaskan strategi pragmatik yang digunakan dalam komentar pengguna media sosial.
3. Mengkaji peran elemen multimodal dalam pembentukan makna komunikasi digital.
4. Mengungkap dinamika polarisasi opini serta relasi kuasa dan identitas dalam masyarakat digital.

### **1.6 Landasan Teori**

Untuk memahami bagaimana makna tentang isu sampah di Bali dikonstruksi dan diperdebatkan dalam ruang digital, diperlukan pendekatan teoretis yang tidak hanya berfokus pada bahasa sebagai sistem, tetapi juga sebagai praktik sosial yang sarat dengan ideologi dan relasi kuasa. Oleh karena itu, penelitian ini memanfaatkan perspektif:

### a) **Cyberpragmatics**

Cyberpragmatics merupakan cabang pragmatik yang secara khusus mengkaji bagaimana makna diproduksi, dinegosiasikan, dan diinterpretasikan dalam komunikasi yang dimediasi oleh teknologi digital (computer-mediated communication). Konsep ini pertama kali dikembangkan oleh Francisco Yus yang melihat komunikasi internet sebagai fenomena pragmatik yang unik karena dipengaruhi oleh karakteristik medium digital itu

*Cyberpragmatics is an analysis of internet-mediated communication from the perspective of cognitive pragmatics* (Yus, 2011) . Pernyataan ini menegaskan bahwa *cyberpragmatics* tidak hanya mempelajari bahasa sebagai sistem, tetapi juga menitikberatkan pada proses kognitif dalam memahami makna, khususnya bagaimana pengguna melakukan inferensi terhadap ujaran dalam konteks digital.

Dalam komunikasi digital, makna tidak sepenuhnya terkode secara eksplisit dalam bentuk linguistik. Sebaliknya, makna bersifat *underdetermined*, yaitu hanya sebagian yang tersurat dalam teks, sementara sisanya harus diinterpretasikan oleh pembaca melalui konteks, pengetahuan latar, dan petunjuk pragmatik lainnya. Hal ini diperkuat oleh temuan bahwa komunikasi daring sering kali bergantung pada "*contextual assumptions, platform conventions, and shared background knowledge*" dalam membangun makna.

Berbeda dengan pragmatik klasik yang berfokus pada interaksi tatap muka, cyberpragmatics menekankan beberapa karakteristik utama komunikasi digital, yaitu:

#### 1. **Ketidaklangsungan (indirectness)**

Komunikasi digital cenderung mengandalkan makna implisit seperti sindiran, ironi, dan sarkasme. Hal ini terjadi karena keterbatasan isyarat non-verbal sehingga penutur memilih strategi tidak langsung untuk menyampaikan maksud tertentu.

#### 2. **Kontekstual tetapi terfragmentasi**

Konteks dalam komunikasi digital tidak selalu hadir secara utuh. Interaksi terjadi dalam potongan-potongan (thread, komentar, repost), sehingga interpretasi makna sangat bergantung pada kemampuan pengguna merekonstruksi konteks tersebut. Dalam perspektif *cyberpragmatics*, konteks tidak lagi bersifat fisik, tetapi bersifat kognitif dan digital.

#### 3. **Multimodalitas**

Komunikasi digital melibatkan berbagai mode semiotik seperti teks, emoji, GIF, meme, dan simbol visual. Elemen-elemen ini berfungsi sebagai pengganti atau pelengkap isyarat non-verbal dalam komunikasi tatap muka.

Selain itu, *cyberpragmatics* juga menyoroti bahwa kualitas interpretasi sangat dipengaruhi oleh karakteristik medium digital. Yus menegaskan bahwa *the quality of interpretations... is often affected by the textual properties of the medium* . Artinya, struktur teks digital yang sering kali singkat, terpotong, dan kontekstual memengaruhi bagaimana makna dipahami oleh pembaca. Dalam perkembangan penelitian linguistik, *cyberpragmatics* juga dipahami sebagai bidang interdisipliner yang menggabungkan pragmatik, sosiolinguistik, dan studi media digital. Penelitian menunjukkan bahwa praktik bahasa di ruang digital tidak hanya berfungsi untuk menyampaikan informasi,

tetapi juga untuk menyembunyikan maksud ujaran, membangun humor, memanipulasi makna, serta membangun relasi sosial antar pengguna .

Hal ini menegaskan bahwa komunikasi digital bukan sekadar pertukaran pesan, tetapi merupakan arena negosiasi makna yang kompleks. Dalam konteks kajian ini, *cyberpragmatics* digunakan sebagai kerangka analitis untuk:

1. Mengungkap makna implisit dalam komentar pengguna terkait isu sampah di Bali, terutama yang diwujudkan melalui implikatur, ironi, dan sarkasme.
2. Menganalisis variasi interpretasi, yaitu bagaimana satu ujaran dapat dimaknai berbeda oleh pengguna yang memiliki latar belakang dan posisi ideologis yang berbeda.
3. Menjelaskan fenomena miskomunikasi dan polarisasi, yang sering muncul akibat keterbatasan konteks dan tingginya ketergantungan pada inferensi dalam komunikasi digital.
4. Mengidentifikasi peran elemen multimodal, seperti emoji dan simbol visual, dalam memperkuat, mengaburkan, atau bahkan membalik makna ujaran.

Dengan demikian, *cyberpragmatics* memberikan landasan teoretis yang kuat untuk memahami bahwa makna dalam komunikasi digital tidak bersifat statis, melainkan dinamis, kontekstual, dan sangat dipengaruhi oleh interaksi antara bahasa, teknologi, dan pengguna.

## **b) Teori Implikatur**

Teori implikatur yang dikemukakan oleh H. P. Grice merupakan salah satu pilar utama dalam kajian pragmatik, khususnya dalam memahami bagaimana makna tidak langsung (*implicit meaning*) dikonstruksi dalam komunikasi. Grice menjelaskan bahwa dalam percakapan, penutur tidak selalu menyampaikan maksudnya secara eksplisit, melainkan sering kali mengandalkan makna tersirat yang harus disimpulkan oleh mitra tutur melalui proses inferensi.

Dalam kerangka ini, Grice menyatakan bahwa *what is implicated is distinct from what is said*. (apa yang diimplikasikan berbeda dari apa yang dikatakan secara literal) . Pernyataan ini menegaskan bahwa makna komunikasi tidak hanya terletak pada ujaran yang tampak, tetapi juga pada maksud yang tersembunyi di baliknya.

Grice memperkenalkan konsep *Prinsip Kerja Sama (Cooperative Principle)*, yang menekankan bahwa kontribusi dalam percakapan harus disesuaikan dengan kebutuhan interaksi komunikatif. Prinsip ini kemudian dioperasionalkan ke dalam empat maksim percakapan, yaitu maksim kuantitas (*quantity*), maksim kualitas (*quality*), maksim relevansi (*relation*), dan maksim cara (*manner*).

Implikatur muncul ketika penutur melanggar atau menyimpangkan maksim-maksim tersebut secara sengaja, sehingga mitra tutur terdorong untuk mencari makna lain di balik ujaran tersebut. Dalam konteks komunikasi digital, implikatur menjadi semakin dominan karena keterbatasan isyarat non-verbal dan tingginya penggunaan bahasa tidak langsung. Pengguna media sosial sering memanfaatkan strategi seperti sindiran (*sarcasm*), ironi (*irony*), *understatement* atau *overstatement* untuk menyampaikan kritik atau evaluasi tanpa menyatakannya secara eksplisit.

Komentar seperti *"Bali makin indah ya 😊"* dalam konteks video yang menampilkan tumpukan sampah jelas tidak dapat dipahami secara literal. Ujaran tersebut melanggar maksim kualitas (karena tidak sesuai fakta), sehingga memunculkan implikatur berupa kritik terhadap kondisi lingkungan. Emoji 😊 dalam konteks ini justru memperkuat ironi, bukan menandakan kebahagiaan. Fenomena ini menunjukkan bahwa implikatur dalam komunikasi digital tidak hanya berfungsi sebagai alat penyampaian makna, tetapi juga sebagai strategi retorik, untuk menyampaikan kritik secara halus atau terselubung, alat negosiasi sosial, untuk menjaga jarak atau solidaritas, penanda ideologis, yang merefleksikan posisi dan sikap penutur terhadap suatu isu.

### c) Teori (Ketidak) Santunan Berbahasa

Teori kesantunan berbahasa yang dikemukakan oleh Penelope Brown dan Stephen C. Levinson merupakan kerangka klasik dalam pragmatik yang menjelaskan bagaimana individu menggunakan bahasa untuk menjaga hubungan sosial (Sapitri et al., 2019; Fathi, 2024; María & Corresponding, 2012) Konsep utama dalam teori ini adalah *face*, yaitu citra diri yang ingin dipertahankan oleh setiap individu dalam interaksi sosial. Brown dan Levinson membedakan *face* menjadi dua, yakni *positive face* (keinginan untuk dihargai dan diterima), *negative face* (keinginan untuk bebas dari tekanan atau paksaan).

Dalam interaksi, penutur cenderung menghindari atau memitigasi *Face Threatening Acts* (FTA) melalui berbagai strategi kesantunan. Strategi kesantunan dipandang sebagai upaya untuk menjaga *face* mitra tutur, sehingga interaksi tetap berjalan harmonis. Dengan demikian, kesantunan berfungsi sebagai mekanisme sosial yang bertujuan memelihara keharmonisan dan mengurangi potensi konflik (Fathi, 2024; María & Gil, 2012; Sapitri et al., 2019). Namun, dalam perkembangan kajian pragmatik, muncul perspektif yang tidak hanya melihat bagaimana kesantunan dibangun, tetapi juga bagaimana ketidaksantunan digunakan secara strategis.

Dalam hal ini, (Culpeper, 1996) mengembangkan teori ketidaksantunan (*impoliteness*) yang menyoroti penggunaan bahasa untuk menyerang, merendahkan, atau merusak *face* pihak lain. Berbeda dengan kesantunan yang bersifat mitigatif, ketidaksantunan justru bersifat konfrontatif dan sering kali disengaja. Strategi ketidaksantunan menurut Culpeper meliputi *bold on record impoliteness* (serangan langsung), *positive impoliteness* (merusak kebutuhan akan penerimaan sosial), *negative impoliteness* (mengganggu kebebasan individu), *sarcasm/mock politeness* (kesantunan semu yang bersifat ironi), *withholding politeness* (tidak memberikan respons yang diharapkan).

Dalam konteks komunikasi digital, khususnya di media sosial, praktik ketidaksantunan cenderung lebih intens dibandingkan komunikasi tatap muka. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti anonimitas, jarak sosial, serta minimnya kontrol sosial langsung. Analisis (ketidak)santunan berbahasa menjadi penting untuk mengungkap bagaimana relasi kuasa dan konflik sosial termanifestasi dalam praktik komunikasi digital. (Cao & Yu, 2024; Culpeper & Tantucci, 2021)

Dalam penelitian ini, teori (ketidak)santunan digunakan untuk:

1. Mengidentifikasi bentuk-bentuk ujaran yang mengancam atau menyerang *face* dalam komentar media sosial.
2. Menganalisis strategi ketidaksantunan yang digunakan pengguna dalam menyampaikan kritik terhadap isu sampah di Bali.

3. Mengungkap fungsi sosial dan ideologis dari penggunaan bahasa yang tidak santun.
4. Menjelaskan hubungan antara bahasa, emosi, dan polarisasi opini dalam ruang digital.

Dengan demikian, teori (ketidak)santunan memberikan kerangka analitis yang kuat untuk memahami bahwa bahasa dalam media sosial tidak hanya bersifat komunikatif, tetapi juga politis dan ideologis.

#### d) Analisis Wacana Kritis (Critical Discourse Analysis/CDA)

**Analisis Wacana Kritis (AWK)** merupakan pendekatan yang memandang bahasa tidak sekadar sebagai alat komunikasi, tetapi sebagai praktik sosial yang sarat dengan relasi kuasa, ideologi, dan konstruksi identitas. Norman Fairclough, menegaskan bahwa wacana memiliki peran aktif dalam membentuk dan mereproduksi struktur sosial. Dalam perspektif ini, setiap praktik bahasa termasuk komentar di media sosial tidak bersifat netral, melainkan selalu terikat pada konteks sosial, politik, dan kultural tertentu.

AWK berangkat dari asumsi bahwa relasi kuasa tidak hanya hadir secara eksplisit, tetapi juga termanifestasi secara halus melalui pilihan bahasa, struktur wacana, dan strategi komunikasi. Dalam diskursus digital, relasi kuasa dapat terlihat dari bagaimana pengguna memposisikan diri, pihak lain, maupun institusi tertentu, misalnya pemerintah. Bahasa menjadi medium untuk menegaskan dominasi, melakukan resistensi, atau bahkan mendeligitimasi otoritas tertentu. Dengan demikian, analisis terhadap ujaran tidak hanya berfokus pada makna linguistik, tetapi juga pada bagaimana makna tersebut berkontribusi terhadap reproduksi atau perlawanan terhadap struktur kekuasaan.

Selain relasi kuasa, CDA juga menyoroti peran **ideologi** dalam wacana. Ideologi dipahami sebagai sistem keyakinan atau cara pandang yang secara implisit membentuk cara individu memahami realitas. Dalam praktik komunikasi digital, ideologi sering kali tidak dinyatakan secara langsung, tetapi tersirat melalui pilihan leksikal, metafora, maupun strategi retorik seperti ironi dan sarkasme. Melalui AWK, peneliti dapat mengungkap bagaimana ideologi tertentu misalnya kritik terhadap pemerintah atau pembelaan terhadap masyarakat dikonstruksi, dinegosiasikan, dan dipertentangkan dalam interaksi daring.

AWK juga memberikan perhatian pada konstruksi identitas dalam wacana. Identitas tidak dipandang sebagai sesuatu yang tetap, melainkan sebagai sesuatu yang dibangun secara dinamis melalui bahasa. Dalam konteks media sosial, pengguna tidak hanya menyampaikan pendapat, tetapi juga secara simultan membangun citra diri, seperti sebagai warga yang kritis, netizen yang rasional, atau bagian dari kelompok tertentu. Identitas ini muncul melalui pilihan kata, gaya bahasa, serta posisi yang diambil dalam perdebatan. Dengan demikian, wacana digital menjadi arena yang mana identitas sosial tidak hanya direpresentasikan, tetapi juga diproduksi dan dinegosiasikan secara terus-menerus.

Dalam kerangka Norman Fairclough (1995) analisis wacana dilakukan melalui tiga dimensi utama, yaitu: (1) teks (analisis linguistik), (2) praktik diskursif (proses produksi dan konsumsi teks), dan (3) praktik sosial (konteks sosial yang lebih luas). Melalui tiga

dimensi ini, CDA memungkinkan peneliti untuk memahami hubungan antara bahasa dan struktur sosial secara komprehensif, sehingga dapat mengungkap bagaimana wacana digital tidak hanya merefleksikan realitas, tetapi juga turut membentuknya.

Penggunaan AWK dalam penelitian ini menjadi penting untuk mengungkap bagaimana (ketidak)santunan berbahasa, implikatur, serta strategi pragmatik lainnya tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun makna, menegosiasikan kekuasaan, serta membentuk realitas sosial dalam diskursus digital.

## **2. PEMBAHASAN**

Bagian pembahasan ini menyajikan analisis mendalam terhadap temuan penelitian mengenai diskursus sampah Bali di media sosial, dengan menitikberatkan pada bagaimana makna dikonstruksi, dinegosiasikan, dan dipertentangkan melalui praktik berbahasa digital. Berangkat dari data empiris berupa komentar netizen, pembahasan ini tidak hanya mengidentifikasi bentuk-bentuk linguistik yang muncul, tetapi juga mengkaji fungsi pragmatik, dimensi multimodal, serta relasi kuasa yang melatarbelakanginya.

### **2.1 Konstruksi dan Negosiasi Makna dalam Diskursus Sampah Bali (Pengembangan Deskriptif-Analitis)**

Berdasarkan hasil analisis data, konstruksi makna dalam diskursus sampah Bali di media sosial menunjukkan karakter yang tidak stabil dan tidak tunggal. Makna tidak diproduksi secara langsung oleh penutur, melainkan terbentuk melalui proses negosiasi yang dinamis antar pengguna dalam ruang interaksi digital. Komentar-komentar yang muncul tidak hanya merepresentasikan opini individual, tetapi juga menjadi bagian dari praktik diskursif kolektif yang berkontribusi dalam membangun narasi publik tentang kondisi Bali.

#### **2.1.1 Makna Non-Literal dan Inferensial**

Diskursus sampah di Bali, didominasi oleh penggunaan bentuk-bentuk non-literal seperti pada data 1.

Data 1

“Bali makin indah ya 😊”

“Surga dunia... penuh plastik 🗑️”

“Welcome to paradise version sampah edition”

Secara linguistik, ujaran tersebut mengandung evaluasi positif. Namun, ketika dikaitkan dengan konteks visual berupa tumpukan sampah, makna yang muncul justru berlawanan, yaitu kritik terhadap kondisi lingkungan. Hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara makna literal dan makna kontekstual, yang memaksa pembaca untuk melakukan inferensi.

Makna ujaran tidak selalu terletak pada apa yang dikatakan secara literal, melainkan pada apa yang diimplikasikan melalui proses inferensi (Dahlman, 2022; Gotzner, 2019;

Hall & Mazzarella, 2023; Zakkou, 2025). Pelanggaran maksim terutama maksim kualitas dipandang sebagai kesalahan komunikasi, tetapi penyampaian makna secara implisit sebagai strategi pragmatik untuk menghasilkan makna berupa kritik atau ironi.

Makna implisit (implikatur) merupakan makna yang tidak secara eksplisit dinyatakan, tetapi disimpulkan oleh pendengar berdasarkan prinsip kerja sama dalam komunikasi. Pelanggaran maksim percakapan secara sengaja digunakan sebagai strategi untuk menghasilkan implikatur, terutama dalam wacana yang bersifat ironis dan kritis di ruang digital (Boukhelif et al., 2023; Dynel, 2021; Fahri et al., 2025; Fegasanti et al., 2025). Komunikasi digital bersifat *underdetermined*, yaitu makna tidak sepenuhnya terkandung dalam teks, tetapi harus direkonstruksi melalui proses inferensi berdasarkan konteks dan pengetahuan latar (Guillemot, 2024) (Yus, 2011).

Dengan demikian, makna tidak berada pada teks itu sendiri, melainkan pada interaksi antara teks, konteks visual, dan pembaca sebagai penafsir aktif.

## Data 2



Komentar: “investor Kura Kura tersenyum bangga 🧨👉😄”

Komentar ini secara permukaan menampilkan ekspresi yang menyerupai pujian, terutama melalui frasa “tersenyum bangga” serta penggunaan emoji 🧨 dan 👉 yang lazim digunakan untuk menunjukkan apresiasi. Namun, dalam konteks kebijakan pengelolaan sampah yang berpotensi menimbulkan dampak sosial, ekspresi tersebut tidak dapat dipahami secara literal.

Secara deskriptif, makna dalam komentar ini dibangun melalui ketidaksesuaian antara bentuk bahasa dan konteks situasi. Penyebutan “investor Kura Kura” mengarahkan pembaca pada pihak tertentu yang diasosiasikan dengan kepentingan ekonomi. Ketika dikaitkan dengan kebijakan yang sedang dibahas, muncul kesan bahwa kebijakan

tersebut tidak berdiri netral, melainkan memiliki keterkaitan dengan kepentingan investor.

Penggunaan emoji 😊 menjadi penanda penting dalam proses pemaknaan. Emoji ini menggeser interpretasi dari apresiasi menjadi ironi, sehingga keseluruhan ujaran dipahami sebagai sindiran. Dengan demikian, makna tidak terletak pada kata “bangga” itu sendiri, tetapi pada hubungan antara teks, konteks kebijakan, dan penanda visual yang menyertainya.

Komentar ini menunjukkan bahwa pengguna media sosial dapat menyampaikan kritik tanpa mengungkapkannya secara langsung. Kritik dibungkus dalam bentuk yang tampak positif, tetapi melalui konteks dan elemen multimodal, makna yang muncul justru berlawanan (David Tomás, Reynier Ortega-Bueno, Guobiao Zhang, Paolo Rosso, n.d.; Sha & Brookes, 2026).

Komentar: “KALIAN TAU KALAU DI BELAKANG TPA SUWUNG TU LAGI DI BANGUN MEGA PROYEK... DAN MASYARAKAT DI TUNTUT BUAT MANDIRI...”

Komentar ini memiliki karakteristik yang berbeda karena disampaikan dalam bentuk narasi panjang dan argumentatif. Penggunaan huruf kapital secara keseluruhan memberikan kesan penekanan dan menunjukkan intensitas emosi penutur. Secara deskriptif, bentuk ini mencerminkan upaya untuk menarik perhatian dan menegaskan pentingnya informasi yang disampaikan.

Isi komentar tidak hanya merespons kebijakan, tetapi juga menghadirkan informasi tambahan mengenai adanya “mega proyek”. Informasi ini kemudian dikaitkan dengan kebijakan pengelolaan sampah, sehingga membentuk hubungan sebab-akibat secara implisit. Meskipun tidak dinyatakan secara langsung, pembaca diarahkan untuk memahami bahwa kebijakan tersebut mungkin berkaitan dengan kepentingan pembangunan.

Makna dibangun melalui penggabungan antara fakta yang disebutkan dan asumsi yang dihasilkan. Penutur tidak secara eksplisit menuduh, tetapi menyusun narasi yang membuka kemungkinan interpretasi tertentu. Pembaca kemudian berperan aktif dalam menghubungkan informasi tersebut dengan konteks yang lebih luas.

Secara deskriptif, komentar ini menunjukkan bagaimana pengguna media sosial tidak hanya mengomentari, tetapi juga memproduksi wacana alternatif. Wacana yang awalnya berfokus pada kebijakan teknis pengelolaan sampah bergeser menjadi diskursus yang melibatkan isu ekonomi dan pembangunan. Dengan demikian, makna berkembang dari sekadar respons menjadi konstruksi narasi yang lebih kompleks.

Komentar: “Apa ya presiden harus turun tangan”

Komentar ini berbentuk pertanyaan, namun tidak berfungsi sebagai permintaan informasi. Secara deskriptif, pertanyaan ini bersifat retorik, yaitu digunakan untuk menyampaikan sikap atau penilaian tertentu tanpa mengharapkan jawaban langsung. Penggunaan kata “harus” menunjukkan adanya penilaian bahwa situasi yang terjadi sudah berada pada tingkat yang serius. Penutur secara implisit menyatakan bahwa

penanganan di tingkat lokal dianggap tidak memadai, sehingga diperlukan intervensi dari otoritas yang lebih tinggi.

Makna dalam komentar ini tidak disampaikan secara eksplisit sebagai kritik, tetapi muncul melalui struktur pertanyaan yang mengandung asumsi tertentu. Pembaca diarahkan untuk memahami bahwa terdapat ketidakpuasan terhadap kebijakan atau pelaksanaannya. Secara deskriptif, komentar ini menunjukkan bagaimana pengguna media sosial menggunakan bentuk bahasa yang sederhana untuk menyampaikan evaluasi yang kompleks. Tanpa menggunakan kata-kata yang keras, penutur tetap dapat mengungkapkan keraguan dan ketidakpercayaan terhadap efektivitas kebijakan.

### 2.1.2 Negosiasi Makna dalam Interaksi Berantai (Analisis Tajam dan Kritis)

Data interaksi berantai menunjukkan bahwa makna dalam diskursus sampah Bali tidak pernah bersifat final atau melekat pada satu ujaran, melainkan bergerak secara dinamis melalui proses sekuensial yang melibatkan banyak aktor. Pola berikut menjadi kunci analisis:

Data 3

Komentar awal (ambigu)

“Bali makin indah ya 😊”

Respon 1 (penolakan literal):

“Indah apanya? Sampah dimana-mana!”

Respon 2 (reinterpretasi):

“Dia lagi nyindir kali 😊”

Respon 3 (penegasan makna):

“Fakta pahit bro, Bali lagi krisis sampah”

Respon 4 (kontra-narasi):

“Jangan lebay, masih banyak tempat bersih kok”

Komentar awal berfungsi sebagai *trigger* interpretatif karena mengandung ambiguitas pragmatik. Ujaran tersebut membuka dua kemungkinan yaitu makna literal (pujian) dan makna implisit (sindiran). Ambiguitas ini menciptakan ruang negosiasi karena makna belum ditentukan dan masih terbuka untuk dimaknai. Dalam perspektif *cyberpragmatics*, kondisi ini disebut sebagai *underdeterminacy*, yaitu ketika teks tidak menyediakan cukup informasi untuk menentukan makna secara tunggal

Jika dianalisis secara berlapis, interaksi ini menunjukkan tahapan negosiasi makna yang sistematis:

a. Tahap Disrupsi (Respon 1): Dekonstruksi Makna Literal

Respon pertama “*Indah apanya?*” Secara pragmatik, respons ini melakukan dekonstruksi terhadap makna permukaan dengan cara mempertanyakan validitas ujaran awal. Pertanyaan retorik tersebut bukan sekadar permintaan klarifikasi, melainkan strategi untuk menolak asumsi implisit bahwa kondisi Bali “indah”, serta menggeser kerangka interpretasi dari evaluasi normatif (pujian) ke evaluasi empiris (realitas sampah).

Dalam tahap ini, terjadi apa yang dapat disebut sebagai *epistemic challenge*, yaitu upaya untuk menggugat dasar pengetahuan yang diasumsikan dalam ujaran awal. Respon ini memaksa pembaca lain untuk mempertimbangkan ulang konteks visual (sampah) sebagai landasan utama pemaknaan. Dengan demikian, tahap disrupsi berfungsi sebagai pemutus stabilitas makna awal dan membuka ruang bagi reinterpretasi.

b. Tahap Reframing (Respon 2): Rekonstruksi Kerangka Interpretatif

Respon kedua “*Dia lagi nyindir kali 😊*” menandai pergeseran penting dari penolakan menuju rekonstruksi makna. Pada tahap ini, ujaran awal tidak lagi dipahami sebagai kesalahan atau ketidaksesuaian, melainkan sebagai strategi retorik berupa sarkasme.

Fungsi utama tahap ini adalah melakukan reframing, yaitu: mengalihkan interpretasi dari literal ke non-literal, menyediakan “kunci baca” (*interpretive key*) bagi pengguna lain, serta mengarahkan konsensus awal tentang bagaimana ujaran tersebut seharusnya dipahami.

Emoji 😊 berfungsi sebagai penanda pragmatik yang memperkuat interpretasi ironi, sehingga berkontribusi dalam memperjelas arah pemaknaan dan mengurangi tingkat ambiguitas ujaran. Dengan demikian, tahap ini menunjukkan bahwa makna tidak hanya dinegosiasikan melalui isi ujaran, tetapi juga melalui metakomentar tentang bagaimana ujaran harus ditafsirkan.

c. Tahap Stabilisasi (Respon 3): Normalisasi Makna Dominan

Respon ketiga “*Fakta pahit bro...*” memperlihatkan upaya untuk menstabilkan makna yang telah direkonstruksi pada tahap sebelumnya. Jika tahap reframing menawarkan kemungkinan interpretasi, maka tahap stabilisasi berfungsi untuk mengukuhkan interpretasi tersebut sebagai kebenaran sosial. memperluasnya dari sekadar sindiran menjadi klaim faktual, serta memperkuat legitimasi makna melalui nada afirmatif.

Pada tahap ini terjadi pergeseran dari ranah interpretasi menuju bentuk deklaratif. Ujaran tidak lagi diposisikan sebagai opini, melainkan sebagai representasi realitas yang ditegaskan melalui ungkapan “fakta pahit”. Fenomena ini mengindikasikan adanya kecenderungan hegemonik dalam diskursus, yakni upaya untuk mendorong satu interpretasi tertentu menjadi makna dominan yang dipandang paling legitim dan otoritatif. Dengan demikian, tahap stabilisasi adalah proses di mana makna: memperoleh legitimasi sosial, mendapatkan dukungan implisit dari pengguna lain, dan mulai mengurangi ruang ambiguitas.

d. Tahap Resistensi (Respon 4): Kontestasi dan Penolakan Dominasi Makna

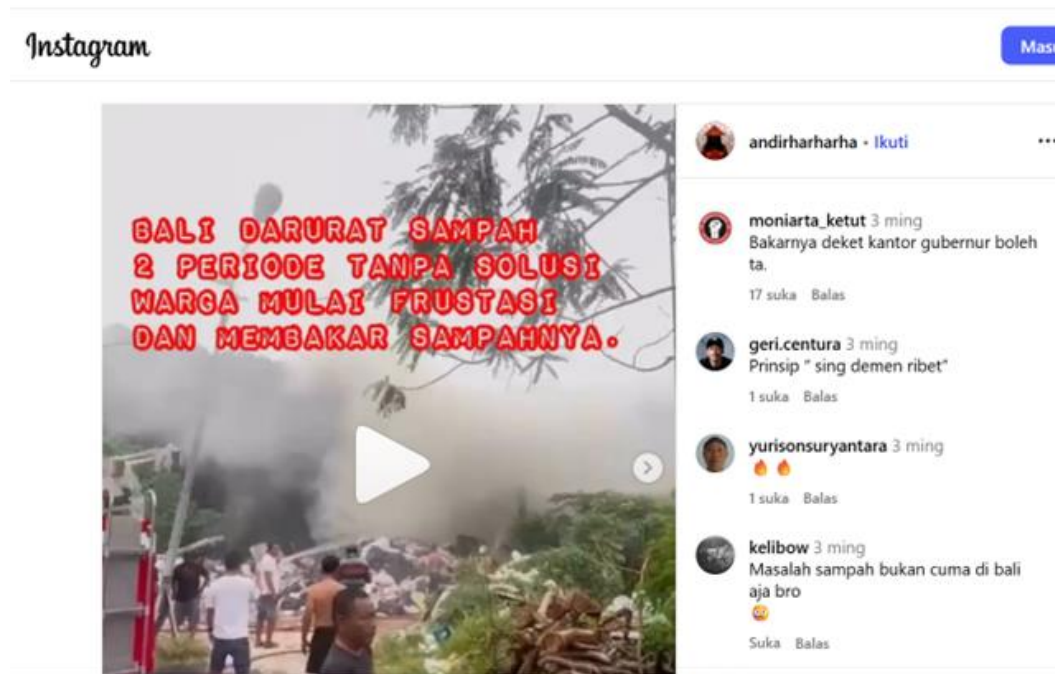
Respon keempat “*Jangan lebay...*” menunjukkan bahwa proses stabilisasi tidak pernah sepenuhnya final. Tahap ini menghadirkan resistensi terhadap makna yang mulai dominan, dengan cara: menolak generalisasi, merelatifkan klaim sebelumnya, serta mengajukan perspektif alternatif.

Secara pragmatik, ujaran ini berfungsi sebagai *counter-discourse*, yaitu upaya untuk: mengganggu hegemoni makna yang sedang terbentuk, membuka kembali ruang interpretasi, serta mempertahankan keberagaman perspektif. Penggunaan kata “lebay” (berlebihan) juga mengandung evaluasi terhadap gaya komunikasi, bukan hanya isi pesan. Ini menunjukkan bahwa resistensi tidak hanya terjadi pada level makna, tetapi juga pada norma bagaimana realitas seharusnya direpresentasikan.

### 2.1.3 Makna sebagai Hasil Kompetisi Interpretatif

Data 4 memperlihatkan bahwa makna tidak hanya dinegosiasikan, tetapi juga dipertentangkan.

Data 4



Komentar “*Bakarnya dekat kantor gubernur boleh ta*” merepresentasikan posisi kritis yang secara implisit menyalahkan pemerintah. Ujaran ini mengarahkan pembaca pada interpretasi bahwa masalah sampah berkaitan dengan kegagalan otoritas dalam pengelolaan lingkungan.

Sementara itu, komentar "*Prinsip 'sing demen ribet'*" (tidak suka ribet) tidak secara tegas menunjuk satu pihak, tetapi membuka dua kemungkinan interpretasi berupa kritik terhadap masyarakat yang memilih solusi instan, atau kritik terhadap sistem yang tidak menyediakan alternatif. Dengan demikian, komentar ini berada pada posisi ambivalen dan memperluas spektrum makna.

Di sisi lain, komentar "*Masalah sampah bukan cuma di Bali aja bro*" menghadirkan posisi yang berbeda dengan merelatifkan isu. Ujaran ini tidak secara langsung menolak kritik, tetapi menggeser fokus dari lokal ke konteks yang lebih luas. Akibatnya, intensitas kritik terhadap Bali menjadi berkurang. Komentar berupa emoji "👉👉" tidak memberikan posisi yang eksplisit, tetapi tetap berkontribusi dalam wacana sebagai bentuk reaksi yang terbuka terhadap berbagai interpretasi yang ada.

Keempat komentar tersebut memperlihatkan bahwa pemaknaan terhadap isu sampah tidak bergerak dalam satu arah yang linier, melainkan tersebar ke dalam beberapa kerangka interpretasi yang saling berhadapan. Secara deskriptif, terdapat tiga kecenderungan utama yang masing-masing berupaya mendefinisikan "apa sebenarnya masalahnya" dan "siapa yang bertanggung jawab".

Pertama, interpretasi kritis terhadap pemerintah yang tampak pada komentar "*Bakarnya dekat kantor gubernur boleh ta*". Ujaran ini mengarahkan makna pada dimensi struktural, yaitu bahwa persoalan sampah dipahami sebagai kegagalan pengelolaan oleh otoritas. Fokus makna diarahkan ke atas (top-down), sehingga pembaca didorong melihat masalah sebagai konsekuensi dari kebijakan atau ketidakmampuan pemerintah.

Kedua, interpretasi normatif terhadap perilaku sosial yang muncul dalam komentar "*Prinsip 'sing demen ribet'*" (tidak suka ribet). Fokus makna bergeser dari struktur ke agen sosial, yaitu masyarakat. Permasalahan tidak lagi dipahami semata sebagai kegagalan sistem, tetapi sebagai refleksi dari kebiasaan atau pola pikir yang cenderung memilih solusi instan. Dengan demikian, tanggung jawab dimaknai sebagai sesuatu yang tersebar di tingkat individu atau kolektif masyarakat.

Ketiga, interpretasi relativistik yang ditunjukkan oleh komentar "*Masalah sampah bukan cuma di Bali aja bro*". Ujaran ini tidak secara langsung menolak dua interpretasi sebelumnya, tetapi menggeser kerangka pemaknaan ke tingkat yang lebih luas. Masalah diposisikan sebagai fenomena umum, bukan spesifik pada Bali. Akibatnya, intensitas kritik terhadap aktor tertentu menjadi berkurang karena isu ditempatkan dalam konteks yang lebih universal.

Secara analitis, ketiga kecenderungan ini tidak bekerja secara komplementer, melainkan bersaing dalam memperebutkan dominasi makna. Masing-masing komentar mencoba menentukan titik fokus masalah (pemerintah, masyarakat, atau sistem global), mengarahkan atribusi tanggung jawab, dan beserta membingkai cara pembaca memahami situasi.

Tidak ada satu interpretasi yang secara mutlak menguasai wacana, karena setiap kerangka memiliki logika dan daya tariknya sendiri. Akibatnya, makna menjadi tidak stabil dan terus bergerak mengikuti interaksi antar perspektif tersebut. Dengan demikian, kompetisi antar makna menunjukkan bahwa diskursus digital tidak beroperasi

sebagai ruang konsensus, melainkan sebagai arena kontestasi berbagai interpretasi yang saling berhadapan, saling menguatkan, maupun saling menegasikan. Makna yang terbentuk bukan merupakan hasil akhir yang stabil, tetapi bersifat sementara sebagai konsekuensi dari tarik-menarik antara beragam perspektif yang berkembang (Boxman-shabtai & Boxman-shabtai, 2024; Khosravini, 2022; Rathnayake & Suthers, 2025)

## 2.2 Strategi Pragmatik dalam Diskursus Digital

Penggunaan strategi pragmatik dalam diskursus sampah Bali di media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian pesan, tetapi juga sebagai mekanisme untuk mengelola makna, emosi, dan posisi sosial penutur. Strategi tersebut beroperasi secara simultan dalam konteks komunikasi digital yang multimodal, terbuka, dan interaktif, dengan tiga bentuk dominan, yaitu implikatur, sarkasme/ironi, dan ketidaksantunan berbahasa.

### 2.2.1. Implikatur sebagai Strategi Komunikasi Tidak Langsung

Implikatur muncul sebagai strategi utama dalam menyampaikan makna secara tidak langsung. Implikatur merupakan bentuk ujaran yang mempunyai makna implisit. Netizen dalam menyampaikan kritik terhadap isu tata kelola sampah, menggunakan bentuk tuturan ini untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah.

Data 5

“Bali makin indah ya 😊”

“Surga dunia... penuh plastik 🗑️”

Secara literal, ujaran tersebut tampak positif. Namun, dalam konteks visual yang menunjukkan tumpukan sampah, ujaran tersebut justru mengandung kritik. Hal ini menunjukkan adanya pelanggaran maksim kualitas dan relevansi. Implikatur dalam konteks ini memiliki beberapa fungsi yaitu menyampaikan kritik tanpa konfrontasi langsung, menghindari risiko sosial atau konflik terbuka, serta mendorong keterlibatan pembaca melalui proses inferensi (Garassino et al., 2022; Noor, 2025; Saz-rubio, 2023)

### 2.2.2 Ironi dan Sarkasme sebagai Ekspresi Kritik Sosial

Data 6

Instagram



Data 6 menunjukkan bahwa penggunaan ironi dimanfaatkan sebagai strategi utama dalam membangun makna sekaligus menyampaikan kritik sosial secara tidak langsung. Makna tidak dinyatakan secara eksplisit, melainkan dikonstruksi melalui interaksi antara pilihan kata, konteks situasi, dan elemen multimodal yang menyertainya.

Pada komentar *"Ampura... Negara lain ud berlomba space race, kita masih sibuk dengan sampah 🙄"*, penggunaan kata *"ampura"* pada awal ujaran tidak berfungsi sebagai permintaan maaf dalam arti literal, melainkan sebagai pembuka yang meredam sekaligus menandai bahwa akan ada kritik yang disampaikan. Struktur kalimat kemudian menghadirkan dua kondisi yang kontras, yaitu kemajuan negara lain dalam bidang teknologi dan kondisi lokal yang masih bergulat dengan persoalan sampah. Perbandingan ini menjadi mekanisme utama dalam membangun ironi.

Penutur tidak menyatakan secara langsung bahwa kondisi tersebut menunjukkan keterbelakangan, tetapi menghadirkan dua realitas yang berbeda sehingga pembaca secara implisit diarahkan pada kesimpulan tersebut. Emoji 🙄 memperkuat makna dengan menambahkan dimensi emosional berupa kekecewaan atau keputusasaan, sehingga makna tidak hanya dibangun melalui teks, tetapi juga melalui ekspresi visual.

Sementara itu, komentar *"Luar biasa Kak Andi, kumpulkan semua tweet yang viral 🙌 semoga semakin banyak WNI yang atensi permasalahan ini"* menunjukkan bentuk ironi yang lebih halus dan ambigu. Secara literal, ujaran ini tampak sebagai pujian dan dukungan. Namun, jika dikaitkan dengan konteks krisis sampah, muncul kemungkinan interpretasi alternatif bahwa pujian tersebut sekaligus mengandung kritik terhadap pola perhatian publik yang bergantung pada viralitas. Frasa *"kumpulkan semua tweet yang viral"* secara implisit mengisyaratkan bahwa isu lingkungan baru memperoleh perhatian ketika menjadi tren di media sosial. Demikian pula, ungkapan *"semoga semakin banyak WNI yang atensi"* menyiratkan bahwa tingkat kesadaran sebelumnya masih terbatas. Dalam hal ini, makna tidak sepenuhnya pasti, melainkan terbuka terhadap berbagai interpretasi, sehingga ironi bekerja melalui ambiguitas.

Secara keseluruhan, kedua komentar tersebut menunjukkan bahwa ironi dibangun melalui beberapa mekanisme utama. Pertama, kontras antara ekspektasi dan realitas

menghasilkan evaluasi implisit. Kedua, penggunaan bahasa tidak langsung memungkinkan kritik disisipkan melalui perbandingan atau pujian semu. Ketiga, keterlibatan elemen multimodal seperti emoji berfungsi untuk memperkuat atau menggeser arah pemaknaan.

Dengan demikian, ironi dalam komentar netizen berfungsi sebagai strategi pragmatik untuk menyampaikan kritik sosial secara halus namun tetap tajam. Makna tidak dinyatakan secara eksplisit, melainkan dikonstruksi melalui proses interpretasi yang melibatkan pembaca dalam memahami relasi antara teks, konteks, dan ekspresi visual (Giyatmi 1, Sihindun Arumi 2, 2025; Hee, 2018; Nikabadze, 2024).

Sarkasme dan ironi merupakan strategi yang paling menonjol dalam menyampaikan kritik sosial dalam diskursus ini. Berbeda dengan implikatur yang cenderung halus, sarkasme memiliki karakter yang lebih tajam dan evaluatif.

Ujaran seperti *“Welcome to paradise version sampah edition”* dan *“Bali: destinasi wisata + bonus bau sampah 🤢”* memperlihatkan penggunaan sarkasme sebagai bentuk ekspresi kritik yang tajam terhadap kondisi lingkungan. Secara deskriptif, kedua ujaran ini dibangun melalui penggabungan dua elemen yang secara semantik bertentangan yaitu citra ideal Bali sebagai “paradise” atau destinasi wisata unggulan, dan realitas empiris berupa masalah sampah. Ketegangan antara dua makna ini menjadi dasar terbentuknya efek sarkasme.

Dalam kedua ujaran tersebut, sarkasme tidak hanya bekerja melalui pembalikan makna, tetapi juga melalui strategi kontras evaluatif yang menonjolkan ketimpangan antara citra ideal dan realitas. Pada ujaran *“Welcome to paradise version sampah edition”*, frasa *“Welcome to paradise”* merepresentasikan imajinasi kolektif tentang Bali sebagai ruang yang indah, bersih, dan layak dikagumi. Namun, penambahan *“sampah edition”* tidak sekadar membalik makna, melainkan mendekonstruksi citra tersebut secara eksplisit, sehingga menghasilkan efek kritik yang bersifat mengejek. Di sini, sarkasme berfungsi untuk menyingkap ketidaksesuaian antara narasi promosi dan kondisi faktual.

Hal serupa terlihat pada ujaran *“Bali: destinasi wisata + bonus bau sampah”*. Penggunaan kata *“bonus”* tidak hanya menghadirkan ironi, tetapi juga mengandung evaluasi negatif yang diperkuat secara pragmatik. Dalam konteks normal, *“bonus”* diasosiasikan dengan nilai tambah yang menguntungkan. Namun, dalam ujaran ini, kata tersebut mengalami distorsi makna, sehingga justru menandai sesuatu yang tidak diharapkan. Efek yang dihasilkan bukan sekadar sindiran, melainkan penegasan ketidakpuasan yang disampaikan secara satir dan provokatif.

Penggunaan sarkasme pada tersebut menunjukkan adanya ketidakpuasan terhadap kondisi sosial yang tidak disampaikan secara langsung, tetapi melalui strategi bahasa yang menyindir. Sarkasme menjadi medium untuk mengekspresikan kemarahan kolektif yang tidak memiliki saluran formal, sehingga media sosial berfungsi sebagai ruang alternatif untuk menyuarakan kritik (Pragmatic, 2025; Putri et al., 2026). Selain itu, sarkasme juga mencerminkan sikap sinis terhadap narasi resmi yang terus mereproduksi

citra Bali sebagai destinasi wisata ideal, tanpa sepenuhnya mengakui permasalahan lingkungan yang ada.

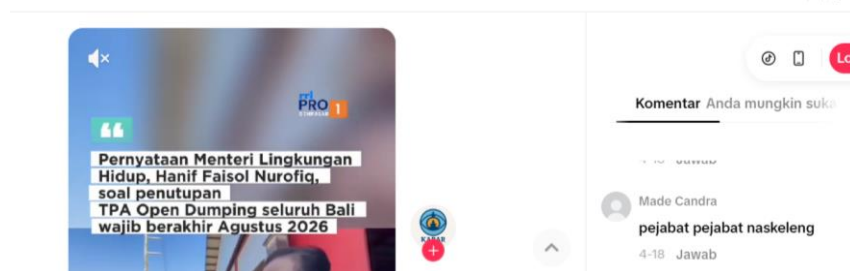
Penggunaan elemen multimodal memperkuat efek sarkasme tersebut. Emoji seperti 😊 atau 👉 tidak hanya berfungsi sebagai ekspresi emosional, tetapi juga sebagai penanda pragmatik yang membantu pembaca mengidentifikasi bahwa ujaran tersebut tidak dimaksudkan secara literal. Emoji 😊, misalnya, dapat menandakan bahwa ujaran tersebut mengandung ironi atau sindiran, sementara 👉 dalam konteks tertentu dapat memperkuat nuansa sarkastik sebagai bentuk “persetujuan semu”. Selain itu, penggunaan tanda baca atau struktur kalimat yang tidak biasa turut mempertegas intensitas makna.

Dengan demikian, sarkasme dalam diskursus ini tidak sekadar berfungsi sebagai gaya bahasa, tetapi sebagai strategi komunikatif yang kompleks. Makna dibangun melalui interaksi antara kontradiksi semantik, konteks sosial, dan elemen multimodal, sehingga menghasilkan kritik yang tidak hanya tajam, tetapi juga mudah dipahami dalam kerangka komunikasi digital.

### 2.2.3 Ketidaksantunan Berbahasa sebagai Alat Kritik dan Resistensi

Selain implikatur dan sarkasme, kritik terhadap pemerintah dilakukan dengan menggunakan ujaran ketidaksantunan.

#### Data 7



Komentar “pejabat pejabat naskeleng” tidak hanya dapat dipahami sebagai bentuk sarkasme agresif, tetapi juga sebagai manifestasi jelas dari ketidaksantunan berbahasa (*impoliteness*) dalam komunikasi digital. Jika dikaitkan dengan teori kesantunan Penelope Brown dan Stephen C. Levinson serta pengembangan teori ketidaksantunan oleh Jonathan Culpeper (Culpeper, 1996) ujaran ini dapat dianalisis sebagai bentuk serangan langsung terhadap *face* (muka) atau citra sosial pihak yang dituju (Demirkol, 2014; María & Gil, 2012).

Secara deskriptif, penggunaan kata “naskeleng” sebagai umpatan (umpatan dalam bahasa Bali yaitu alat kelamin laki-laki) menunjukkan adanya pelanggaran serius terhadap norma kesantunan, khususnya face-threatening acts (FTA). Dalam kerangka Brown dan Levinson, setiap individu memiliki dua jenis *face*, yaitu *positive face* (keinginan untuk dihargai) dan *negative face* (keinginan untuk tidak diganggu atau direndahkan). Komentar ini secara langsung menyerang *positive face* pejabat, karena merendahkan dan mendiskreditkan mereka sebagai kelompok sosial. Bahkan, karena bentuknya yang

vulgar dan eksplisit, ujaran ini tidak lagi bersifat mitigatif, melainkan termasuk dalam kategori bald on-record impoliteness, yaitu serangan tanpa upaya peredaan sama sekali.

Dalam perspektif Jonathan Culpeper, ujaran ini dapat diklasifikasikan sebagai positive impoliteness, karena merusak citra sosial target melalui penghinaan langsung, bald on-record impoliteness, karena disampaikan secara terang-terangan tanpa strategi kesantunan, serta mock impoliteness (sarcasm), karena masih mengandung nuansa sarkastik dalam bentuk pelabelan kolektif.

Pengulangan frasa "*pejabat pejabat*" memperkuat dimensi ketidaksantunan ini, karena memperluas serangan dari individu ke seluruh kelompok. Hal ini menunjukkan bahwa ketidaksantunan tidak hanya bersifat personal, tetapi juga institusional menyerang legitimasi sosial suatu kelompok secara keseluruhan.

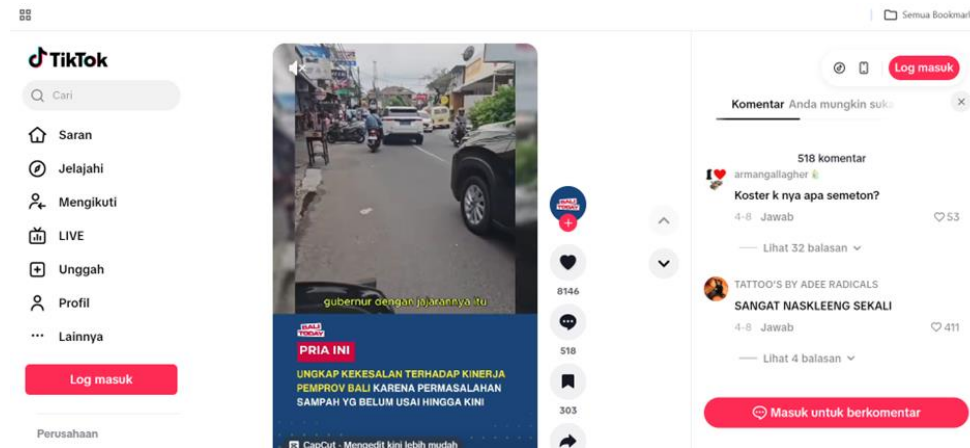
Secara pragmatik, penggunaan ujaran kasar dalam komentar "*pejabat pejabat naskleng*" tidak dapat dipahami semata sebagai pelanggaran norma linguistik, melainkan sebagai tindakan komunikatif yang memiliki tujuan dan efek sosial tertentu.

Pertama, sebagai alat intensifikasi emosi, ujaran kasar berfungsi memperbesar daya ekspresif tuturan. Dalam konteks ini, pilihan kata tabu bukan sekadar variasi leksikal, tetapi menjadi indikator tingkat afeksi penutur yang tinggi, seperti kemarahan, frustrasi, atau kekecewaan. Secara analitis, intensifikasi ini terjadi karena bahasa kasar memiliki *shock value* yang lebih kuat dibandingkan bahasa biasa. Akibatnya, pesan yang disampaikan tidak hanya dipahami secara kognitif, tetapi juga dirasakan secara emosional oleh pembaca. Dengan kata lain, makna tidak hanya dikomunikasikan, tetapi juga "dipaksakan" untuk dirasakan.

Kedua, sebagai strategi delegitimasi, ketidaksantunan berfungsi meruntuhkan otoritas simbolik pihak yang dituju. Dalam komentar ini, pejabat tidak dikritik melalui argumentasi rasional, tetapi melalui pelabelan yang merendahkan. Secara pragmatik, hal ini menggeser fokus dari evaluasi kebijakan ke evaluasi identitas. Ketika aktor direduksi menjadi objek hinaan, legitimasi sosialnya ikut tergerus. Dengan demikian, bahasa menjadi alat untuk mendekonstruksi kekuasaan, bukan melalui debat, tetapi melalui serangan simbolik yang langsung dan menyeluruh.

Dengan demikian, ketidaksantunan di sini bersifat strategis, bukan kebetulan. Penutur secara sadar memilih bentuk bahasa yang ekstrem untuk menghasilkan dampak pragmatik yang kuat. Namun, fenomena ini juga menunjukkan adanya pergeseran norma dalam komunikasi digital. Jika dalam komunikasi tatap muka kesantunan cenderung dijaga, dalam ruang media sosial batas tersebut menjadi lebih longgar. Anonimitas, jarak sosial, dan dinamika interaksi daring memungkinkan munculnya bentuk-bentuk ujaran yang lebih langsung, emosional, dan bahkan agresif.

Data 8



Komentar netizen pada data 8 menunjukkan dua bentuk ujaran yang merepresentasikan spektrum ketidaksantunan dalam komunikasi digital, yaitu *"Koster k nya apa semeton?"* dan *"SANGAT NASKLEENG SEKALI"*. Keduanya tidak hanya berbeda secara bentuk linguistik, tetapi juga memperlihatkan perbedaan strategi pragmatik dalam menyampaikan kritik.

Pada komentar pertama, *"Koster k nya apa semeton?"*, secara permukaan tampak sebagai pertanyaan yang netral dan bahkan santun karena menggunakan sapaan lokal *"semeton"*. Dalam budaya Bali, sapaan ini berfungsi membangun kedekatan sosial dan solidaritas. Namun, jika dikaitkan dengan konteks isu sampah dan kritik terhadap pemerintah, ujaran ini mengandung makna implisit yang lebih kompleks. Pertanyaan tersebut tidak benar-benar dimaksudkan untuk memperoleh informasi, melainkan untuk mempertanyakan kinerja atau respons pihak berwenang. Dengan demikian, terjadi ketegangan antara bentuk dan makna. Secara linguistik tampak santun, tetapi secara pragmatik mengandung kritik.

Fenomena ini menunjukkan praktik ketidaksantunan implisit. Netizen menggunakan strategi tidak langsung (*off-record*) untuk menyampaikan evaluasi negatif. Sapaan *"semeton"* berfungsi sebagai mitigasi, tetapi tidak sepenuhnya menghilangkan daya kritis ujaran. Justru, ambiguitas ini memungkinkan penutur tetap menjaga citra sosial sekaligus menyampaikan ketidakpuasan. Dengan kata lain, kesantunan digunakan sebagai *"topeng"* untuk menyampaikan ketidaksantunan.

Berbeda dengan itu, komentar kedua *"SANGAT NASKLEENG SEKALI"* memperlihatkan bentuk ketidaksantunan yang eksplisit dan tanpa mitigasi. Penggunaan huruf kapital penuh menandakan intensitas emosi yang tinggi, seolah-olah penutur *"berteriak"* dalam ruang digital. Kata *"naskleeng"* sebagai umpatan berbasis bahasa tabu menunjukkan adanya pelanggaran norma kesantunan secara langsung. Tidak terdapat upaya untuk memperhalus ujaran, sehingga komentar ini termasuk dalam kategori bald on-record impoliteness.

Secara analitis, ujaran ini tidak berfungsi untuk menyampaikan argumen atau informasi, melainkan sebagai ekspresi evaluatif yang kuat. Penutur tidak menjelaskan alasan kritiknya, tetapi langsung mengekspresikan penilaian negatif melalui bahasa kasar. Hal ini menunjukkan pergeseran dari komunikasi yang berbasis rasionalitas menuju

komunikasi yang berbasis afeksi. Selain itu, penggunaan penguat seperti *“sangat... sekali”* semakin menegaskan intensitas emosi dan memperkuat efek pragmatik ujaran.

Jika kedua komentar dibandingkan, terlihat adanya dua strategi berbeda dalam menyampaikan ketidaksantunan. Komentar pertama menggunakan pendekatan implisit yang lebih halus, sedangkan komentar kedua menggunakan pendekatan eksplisit yang agresif. Namun, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu mengkritik dan mempertanyakan kondisi atau pihak tertentu. Perbedaan ini menunjukkan bahwa ketidaksantunan dalam komunikasi digital tidak bersifat homogen, melainkan berada pada suatu kontinum dari yang tersamar hingga yang terang-terangan.

Penggunaan bahasa di ruang media sosial, batas antara kesantunan dan ketidaksantunan menjadi semakin cair. Pengguna dapat secara fleksibel memilih strategi berbahasa sesuai dengan tujuan komunikatif, tingkat emosi, dan audiens yang dituju. Ketidaksantunan tidak lagi sekadar pelanggaran norma, tetapi menjadi alat pragmatik untuk mengekspresikan ketidakpuasan, menarik perhatian. Kedua komentar tersebut memperlihatkan bahwa komunikasi digital tidak hanya berfungsi sebagai sarana pertukaran informasi, tetapi juga sebagai arena ekspresi emosi, kritik sosial, dan negosiasi makna melalui berbagai strategi kebahasaan, termasuk ketidaksantunan.

### 2.3 Peran Elemen Multimodal dalam Pembentukan Makna (Pengembangan Deskriptif-Analitis Mendalam)

Elemen multimodal seperti emoji, simbol visual, tanda baca, serta format teks memiliki peran yang sangat signifikan dalam membentuk makna dalam diskursus sampah Bali di media sosial. Elemen-elemen ini tidak dapat diposisikan sebagai pelengkap semata, melainkan sebagai komponen semiotik yang bekerja secara simultan dengan bahasa verbal dalam proses pemaknaan. Dengan kata lain, makna dalam komunikasi digital merupakan hasil dari interaksi antar mode (*multimodal meaning-making*), bukan hanya produk dari teks linguistik.

#### 2.3.1 Elemen Multimodal sebagai Penguat Makna (*Meaning Reinforcement*)

Dalam konteks komunikasi digital, penggunaan emoji seperti 😡 dan 😞 tidak sekadar berfungsi sebagai ornamen visual, tetapi merupakan komponen semiotik yang aktif dalam proses pemaknaan. Pada data seperti *“Sampah makin parah 😡”* dan *“Sedih lihat Bali jadi begini 😞”*, secara verbal makna evaluatif memang sudah hadir. Namun, tanpa kehadiran emoji, intensitas dan arah emosi masih berpotensi ditafsirkan secara beragam. Di sinilah fungsi multimodal menjadi krusial.

Secara analitis, emoji berperan sebagai penanda afektif eksplisit (*affective marker*) yang mengkonkretkan sikap penutur (Alharbi & Mahzari, 2023; Du et al., 2026; Jacobs et al., 2014) Dalam ujaran pertama, kata *“parah”* dapat ditafsirkan sebagai kritik ringan hingga serius. Namun, ketika dipadukan dengan 😡, interpretasi diarahkan secara tegas ke ranah kemarahan atau frustrasi. Demikian pula pada ujaran kedua, kata *“sedih”* diperkuat oleh 😞 sehingga menghasilkan efek emosional yang lebih intens dan tidak ambigu. Dengan kata lain, emoji berfungsi sebagai pengunci makna (*meaning anchor*) yang membatasi kemungkinan interpretasi.

Dalam perspektif pragmatik, emoji dapat dipahami sebagai petunjuk inferensial (*inferential cue*). Dalam komunikasi digital yang minim isyarat nonverbal (seperti intonasi atau ekspresi wajah), pembaca sangat bergantung pada indikator tambahan untuk menafsirkan maksud ujaran. Emoji menggantikan fungsi tersebut dengan menyediakan “*shortcut*” interpretatif. Akibatnya, proses inferensi menjadi lebih cepat dan lebih terarah, karena pembaca tidak perlu sepenuhnya menebak sikap penutur dari teks saja. (Hand, 2023; Id & Robinson, 2020; Mannheim & Juliane, 2021; Pasternak, 2025).

Dari sudut pandang multimodalitas, seperti yang ditegaskan oleh (Carey Jewit, Jeff Bezemer, 2025) makna dibangun melalui interaksi berbagai mode semiotik, bukan hanya bahasa verbal. Dalam kasus ini, terjadi integrasi antara mode linguistik (kata-kata) dan mode visual (emoji) yang saling melengkapi. Kata-kata menyediakan kerangka proposisional (apa yang dibicarakan), sementara emoji menyediakan dimensi interpersonal (bagaimana sikap terhadap hal tersebut). Kombinasi ini menghasilkan makna yang lebih kaya dan lebih presisi.

Selain itu, fungsi penguatan makna juga berkaitan dengan aspek sosial komunikasi. Emoji tidak hanya memperjelas emosi, tetapi juga membantu membangun keselarasan emosional (*emotional alignment*) antara penutur dan pembaca. Ketika pembaca melihat 😊 atau 😞, mereka tidak hanya memahami isi pesan, tetapi juga “diarahkan” untuk merasakan emosi yang sama. Dengan demikian, emoji berperan dalam menciptakan resonansi emosional yang memperkuat dampak komunikasi.

Implikasi penting dari temuan ini adalah bahwa analisis wacana digital tidak dapat lagi hanya berfokus pada teks verbal. Tanpa mempertimbangkan elemen multimodal, analisis akan kehilangan dimensi penting dalam proses pemaknaan. Emoji, sebagai bagian dari sistem tanda digital, memiliki kapasitas untuk mempertegas sikap, mengurangi ambiguitas, serta mengarahkan interpretasi pembaca secara lebih presisi. Elemen multimodal seperti emoji harus dipahami sebagai bagian integral dari strategi pragmatik, bukan sekadar pelengkap. Elemen multimodal berfungsi sebagai penguat makna yang memastikan bahwa pesan tidak hanya dipahami, tetapi juga dirasakan sesuai dengan intensi penutur.

### 2.3.2 Elemen Multimodal sebagai Pengabur Makna (Meaning Ambiguation)

Komentar netizen menunjukkan bahwa relasi antara teks dan emoji tidak selalu bersifat saling memperkuat, tetapi justru dapat menciptakan ambiguitas pragmatik. Ambiguitas ini muncul karena pembaca harus menafsirkan makna melalui dua jalur semiotik sekaligus verbal dan visual yang tidak selalu selaras. Akibatnya, makna tidak langsung stabil, melainkan terbuka terhadap berbagai kemungkinan interpretasi.

#### a) Kontradiksi Visual–Tekstual: Ambiguitas sebagai Ironi Terselubung

Pada komentar “*maju pak koster aku dukung kamu 😊👍*”, secara verbal terlihat adanya dukungan yang eksplisit. Struktur kalimat deklaratif dan pilihan leksikal “*dukung*” mengarah pada pembacaan positif. Namun, kehadiran emoji 😊👍 tidak otomatis memperkuat makna tersebut.

Secara analitis, justru terjadi ketegangan antara literalitas teks dan konvensi pragmatik digital. Dalam praktik komunikasi media sosial, emoji “cinta” tidak selalu merepresentasikan afeksi tulus, tetapi sering digunakan sebagai penanda ironi halus, bentuk *overstatement* (kelebihan ekspresi), atau strategi untuk menyindir tanpa konfrontasi langsung. Makna komentar ini menjadi ambivalen. Di satu sisi, dapat dibaca sebagai dukungan, di sisi lain, dapat dipahami sebagai sarkasme yang dibungkus dalam ekspresi positif.

Ambiguitas ini tidak terletak pada teks atau emoji secara terpisah, tetapi pada relasi kontradiktif di antara keduanya. Fenomena ini menunjukkan bahwa dalam komunikasi multimodal, emoji dapat berfungsi sebagai “*masking device*”, yaitu alat yang menyamarkan niat sebenarnya. Penutur tidak perlu menyatakan kritik secara eksplisit, karena makna sarkastik muncul dari ketidaksesuaian antara apa yang dikatakan dan bagaimana itu “ditampilkan”.

#### b) Emoji sebagai Pelebar Spektrum Emosi (*Emotional Blending*)

Pada komentar “*Kalo gini gmn dong. Ujan dikit pasti banjir 🤔😡*”, teks secara jelas mengandung keluhan terhadap kondisi lingkungan. Namun, kehadiran dua emoji sekaligus 🤔 (pusing/kebingungan) dan 😡 (marah) menghasilkan efek yang lebih kompleks. Secara analitis, kombinasi ini tidak sekadar memperkuat makna, tetapi menciptakan layering emosi: 🤔 merepresentasikan kebingungan, kelelahan, atau ketidakberdayaan, 😡 merepresentasikan kemarahan atau frustrasi. Ketika digabungkan, keduanya membentuk spektrum afektif yang tidak tunggal, melainkan campuran antara kritik rasional, kelelahan emosional, dan potensi kemarahan terhadap pihak tertentu.

Akibatnya, interpretasi menjadi tidak sepenuhnya pasti. Pembaca dapat menafsirkan komentar ini sebagai ekspresi kemarahan terhadap pemerintah, keluhan pasif tanpa target spesifik, atau bahkan bentuk keputusan terhadap situasi yang berulang. Dengan kata lain, emoji di sini tidak “mengunci” makna, tetapi justru membuka ruang interpretasi yang lebih luas.

Elemen multimodal tidak selalu berfungsi sebagai penguat makna, tetapi juga sebagai pengabur makna (*meaning blurring mechanism*), menunjukkan bahwa komunikasi digital tidak bergerak dalam satu arah interpretasi yang stabil. Sebaliknya, makna menjadi hasil dari interaksi kompleks antara berbagai mode semiotik khususnya teks dan emoji yang dapat saling memperkuat, tetapi juga saling menegasikan (Barbieri et al., 2017; Lazzarotti, 2026; Peyrard et al., 2015).

Ketika teks dan emoji tidak sepenuhnya selaras, pembaca dihadapkan pada situasi interpretatif yang tidak pasti. Misalnya, teks yang tampak positif dapat dipadukan dengan emoji yang dalam praktik digital sering diasosiasikan dengan ironi atau sindiran. Dalam kondisi ini, pembaca tidak dapat langsung mengambil makna literal, melainkan harus melakukan proses negosiasi makna. Makna tidak lagi bersifat inheren dalam ujaran, tetapi menjadi hasil interpretasi aktif. Dalam perspektif cyberpragmatics, ini menunjukkan bahwa komunikasi digital bersifat *underdetermined*: teks tidak pernah cukup untuk menentukan makna secara tunggal, sehingga pembaca harus mengisi kekosongan tersebut melalui inferensi.

### 2.3.3 Elemen Multimodal sebagai Pembalik Makna (*Meaning Reversal*)

Dalam praktik komunikasi digital, elemen multimodal tidak hanya berfungsi untuk memperjelas atau mengaburkan makna, tetapi dalam banyak kasus justru membalik makna ujaran secara keseluruhan. Fenomena ini paling tampak dalam penggunaan ironi dan sarkasme, di mana makna yang muncul tidak lagi sejalan dengan makna literal yang diucapkan.

Pada data seperti “*Welcome to paradise 😊*” yang disertai video tumpukan sampah, atau “*Indah sekali 🌳*” dalam konteks lingkungan yang tercemar, secara linguistik kedua ujaran tersebut mengandung evaluasi positif. Namun, ketika dikaitkan dengan konteks visual yang menunjukkan kondisi yang berlawanan, makna yang dihasilkan justru berubah menjadi kritik yang tajam. Pembaca tidak dapat mengandalkan teks semata, tetapi harus mengintegrasikan informasi dari berbagai mode semiotik.

Secara analitis, proses ini dapat dipahami sebagai *reversal of meaning*, yaitu pembalikan arah interpretasi dari positif menjadi negatif. Pembalikan ini terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara teks verbal, yang menyampaikan pujian, emoji, yang dalam konteks tertentu dapat mengandung nuansa ironi, serta konteks visual, yang menghadirkan realitas yang bertentangan.

Konteks visual sering kali menjadi faktor dominan yang “mengalahkan” makna literal teks. Emoji kemudian berfungsi sebagai penanda pragmatik yang mengarahkan pembaca untuk membaca ujaran tersebut secara tidak literal. Makna tidak lagi bersifat tetap atau melekat pada kata-kata, tetapi dikonstruksi ulang melalui relasi antar mode. Pembaca dipaksa untuk melakukan inferensi yang lebih kompleks, yaitu dengan mengenali adanya ironi dan memahami bahwa apa yang dikatakan justru berlawanan dengan apa yang dimaksudkan.

Fenomena ini menunjukkan bahwa elemen multimodal memiliki kekuatan yang signifikan dalam membentuk makna. Elemen multimodal tidak hanya berperan sebagai pelengkap, tetapi mampu menggeser arah interpretasi, dari positif menjadi negatif, bahkan menentukan makna dominan dalam suatu ujaran, terlepas dari bentuk linguistiknya (Hand, 2023; Zappavigna & Logi, 2025).

Dalam perspektif cyberpragmatics, hal ini menegaskan bahwa makna dalam komunikasi digital bersifat dinamis dan kontekstual. Ujaran tidak dapat dipahami secara literal tanpa mempertimbangkan interaksi antara teks, emoji, dan konteks visual. Oleh karena itu, analisis makna dalam wacana digital harus selalu melihat komunikasi sebagai sistem multimodal yang utuh, di mana setiap elemen berkontribusi dalam membentuk dan bahkan membalik makna.

### 2.4 Relasi Kuasa, Polarisasi Opini, Ideologi, dan Konstruksi Identitas dalam Diskursus Digital

Salah satu temuan paling menonjol dalam kajian ini adalah munculnya polarisasi opini yang tajam dalam diskursus sampah Bali di media sosial. Polarisasi ini tidak hanya memperlihatkan perbedaan pandangan, tetapi juga mengungkap bagaimana bahasa digunakan sebagai alat untuk mengonstruksi kuasa, merepresentasikan ideologi, dan

membentuk identitas sosial. Dengan demikian, diskursus ini tidak sekadar menjadi ruang pertukaran informasi, melainkan juga arena kontestasi makna dan kepentingan.

#### 2.4.1 Relasi Kuasa: Bahasa sebagai Instrumen Dominasi dan Resistensi

Bahasa dalam diskursus sampah di Bali di media sosial tidak berfungsi secara netral sebagai alat komunikasi, melainkan sebagai instrumen strategis untuk menegosiasikan relasi kuasa (Fairclough,1989) Setiap komentar tidak hanya merepresentasikan opini personal, tetapi juga merupakan upaya untuk memposisikan diri dalam arena wacana, membangun legitimasi, sekaligus menantang atau melemahkan posisi pihak lain.

Pada data seperti *"Pemerintahnya sibuk pariwisata, sampah nggak diurus!"*, terlihat adanya upaya untuk mendelegitimasi otoritas pemerintah. Secara linguistik, ujaran ini menggunakan struktur deklaratif yang langsung dan evaluatif, tanpa mitigasi, sehingga menghasilkan efek tuduhan yang kuat. Pemerintah diposisikan sebagai aktor yang lalai, sementara netizen mengambil posisi sebagai pengkritik yang memiliki otoritas moral. Dalam konteks ini, bahasa berfungsi sebagai alat untuk meruntuhkan legitimasi institusional melalui representasi negatif.

Namun, narasi tersebut tidak berdiri sendiri. Komentar lain seperti *"Masyarakatnya juga harus sadar, jangan salahin pemerintah terus"* menunjukkan adanya pergeseran lokus tanggung jawab. Ujaran ini berfungsi sebagai bentuk resistensi terhadap narasi dominan yang menyalahkan pemerintah. Secara pragmatik, penutur berusaha menyeimbangkan wacana dengan menempatkan masyarakat sebagai aktor yang juga bertanggung jawab. Dengan demikian, tampak adanya upaya rekonstruksi legitimasi yang menempatkan pemerintah tidak sepenuhnya sebagai pihak yang bersalah.

Komentar *"Ini akibat over tourism, bukan cuma salah lokal"* memperluas kerangka interpretasi ke level global. Dalam hal ini, penutur tidak hanya menolak penyederhanaan masalah, tetapi juga menggeser wacana ke dimensi struktural yang lebih luas, yaitu pariwisata massal sebagai fenomena global. Strategi ini menunjukkan bentuk lain dari negosiasi kuasa. Netizen berupaya mengubah cara memahami permasalahan dengan memasukkan faktor eksternal. Dengan demikian, tanggung jawab tidak lagi bersifat lokal atau individual, tetapi menjadi bagian dari sistem yang lebih kompleks.

Setiap komentar berusaha menetapkan siapa yang bertanggung jawab, menentukan kerangka interpretasi yang dianggap paling valid, serta memengaruhi bagaimana pembaca memahami isu tersebut. Dalam konteks ini, bahasa berfungsi sebagai alat untuk membangun otoritas argumen, melalui pernyataan yang tegas dan evaluatif, mengontrol arah diskusi, dengan mengarahkan fokus pada aktor atau faktor tertentu,serta memengaruhi persepsi publik, dengan membingkai realitas sesuai sudut pandang penutur.

Fenomena ini menunjukkan bahwa diskursus media sosial merupakan ruang yang bersifat konfliktual dan ideologis (Masroor et al., 2019), bukan sekadar pertukaran informasi. Setiap ujaran membawa kepentingan tertentu dan berupaya untuk mendominasi pemaknaan terhadap isu yang dibahas.

Hal ini sejalan dengan pemikiran Teun A. van Dijk yang menekankan bahwa wacana merupakan sarana utama dalam reproduksi relasi kuasa dan kontrol sosial (Dijk, n.d.) Dalam perspektif ini, bahasa tidak hanya merefleksikan realitas, tetapi juga membentuk dan mengatur realitas sosial melalui proses representasi, legitimasi, dan dominasi makna.

#### 2.4.2 Polarisasi Opini dalam Diskursus Digital

Diskursus sampah Bali di media sosial tidak hanya mencerminkan keberagaman opini, tetapi telah berkembang menjadi polarisasi wacana yang tajam dan terstruktur (Masroor et al., 2019). Polarisasi ini muncul bukan sekadar karena perbedaan pandangan, melainkan karena adanya kompetisi ideologis dan perebutan otoritas makna di antara para partisipan diskursus.

Secara analitis, opini publik terbelah ke dalam beberapa kutub interpretatif yang saling berhadapan. Setidaknya terdapat tiga posisi dominan:

- a) Kubu kritik terhadap pemerintah. Komentar seperti *"Pemerintahnya sibuk pariwisata, sampah nggak diurus!"* meringkai pemerintah sebagai aktor utama yang bertanggung jawab. Strategi ini bersifat delegitimatif, karena menurunkan kredibilitas institusi melalui representasi negatif.
- b) Kubu yang menekankan tanggung jawab masyarakat. Ujaran *"Masyarakatnya juga harus sadar..."* berfungsi sebagai counter-discourse, yang menantang narasi dominan. Di sini terjadi pergeseran dari kritik struktural ke kritik kultural, yaitu dari sistem ke perilaku individu.
- c) Kubu struktural-global. Komentar *"Ini akibat over tourism..."* menggeser wacana ke level yang lebih luas. Posisi ini berupaya mendekonstruksi simplifikasi masalah dengan memasukkan faktor global sebagai variabel utama.

Ketiga posisi ini tidak saling melengkapi secara harmonis, melainkan bersaing untuk menjadi kerangka interpretasi yang dominan. Inilah yang membentuk polarisasi bukan sekadar perbedaan, tetapi pertarungan antar cara memahami realitas.

#### 2.4.3 Ideologi: Pertarungan Perspektif dalam Wacana Digital

Polarisasi opini dalam data tidak hanya mencerminkan perbedaan pendapat, tetapi memperlihatkan adanya pertarungan ideologis yang mendalam terkait cara memandang masalah lingkungan, tanggung jawab sosial, dan kemungkinan perubahan (Esteve-delvalle, 2025; Uyheng & Carley, 2020) Dalam konteks ini, diskursus sampah Bali menjadi ruang yang memperlihatkan berbagai ideologi tidak hanya diekspresikan, tetapi juga dipertentangkan dan dinegosiasikan.

Oposisi antara komentar seperti *"Kalau nggak dijaga, Bali bisa rusak total"* dan *"Ah, dari dulu juga gitu, nggak bakal berubah"* menunjukkan adanya benturan antara dua orientasi ideologis yang sangat berbeda, yaitu kesadaran ekologis (*environmental consciousness*) dan fatalisme sosial (*apatisme*). Kelompok pro-lingkungan membangun wacana dengan asumsi bahwa: lingkungan adalah sesuatu yang harus dijaga secara kolektif, kerusakan

lingkungan merupakan ancaman nyata di masa depan, dan perubahan masih mungkin dilakukan melalui tindakan manusia.

Teks tersebut dapat dianalisis melalui tiga dimensi utama, yaitu teks, praktik diskursif, dan praktik sosial (Fairclough, 1995) sehingga terlihat bagaimana bahasa tidak hanya merefleksikan realitas, tetapi juga membentuk cara pandang terhadap isu sampah.

#### a) Dimensi Teks (Text Analysis)

Pada level linguistik, ujaran “Bali bisa rusak total” menunjukkan penggunaan leksikon yang bersifat ekstrem dan hiperbolik. Kata “rusak total” berfungsi sebagai intensifier yang memperkuat evaluasi negatif sekaligus menciptakan efek dramatik. Secara retorik, konstruksi ini tidak sekadar deskriptif, tetapi persuasif karena membangun *sense of urgency*. Pilihan modalitas “bisa” juga menarik, karena mengindikasikan kemungkinan yang masih dapat dicegah, sehingga secara implisit mengajak tindakan.

Sebaliknya, ujaran “nggak bakal berubah” menggunakan bentuk negasi absolut yang mencerminkan kepastian. Struktur ini menutup ruang kemungkinan perubahan dan menghasilkan efek deterministik. Secara linguistik, perbedaan kedua ujaran terletak pada orientasi temporal dan sikap epistemik: yang pertama membuka kemungkinan intervensi, sementara yang kedua menegaskan stagnasi.

#### b) Dimensi Praktik Diskursif (Discursive Practice)

Pada level praktik diskursif, kedua ujaran tersebut merepresentasikan dua pola produksi makna yang berbeda dalam interaksi digital.

Ujaran “Bali bisa rusak total” cenderung diproduksi dalam konteks aktivisme digital atau kritik lingkungan, yang bertujuan membangun kesadaran kolektif. Dalam proses konsumsi, ujaran ini berpotensi memicu respons emosional, seperti kekhawatiran atau kepedulian, serta mendorong reproduksi wacana yang serupa (misalnya komentar yang memperkuat narasi krisis).

Sebaliknya, ujaran “nggak bakal berubah” muncul sebagai respons yang bersifat resistif terhadap narasi urgensi. Ujaran ini merepresentasikan pengalaman sosial yang berulang dan kekecewaan terhadap kegagalan solusi sebelumnya. Dalam konsumsi wacana, ekspresi semacam ini dapat menghambat mobilisasi kolektif karena mengarahkan pembaca pada sikap pasif atau sinis. Kedua ujaran tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi berinteraksi dalam ruang diskursus sebagai bentuk *contest of meaning*—saling memperkuat atau melemahkan narasi tertentu.

#### c) Dimensi Praktik Sosial (Social Practice)

Pada level praktik sosial, perbedaan kedua ujaran mencerminkan pertarungan ideologis dalam masyarakat. Ujaran “Bali bisa rusak total” merepresentasikan ideologi pro-lingkungan yang menekankan pentingnya kesadaran ekologis dan tanggung jawab kolektif. Bahasa digunakan sebagai alat mobilisasi, dengan tujuan membentuk persepsi bahwa situasi berada dalam kondisi kritis yang memerlukan tindakan segera. Dalam perspektif AWK, ini merupakan bentuk penggunaan wacana untuk mendorong perubahan sosial.

Sebaliknya, ujaran “nggak bakal berubah” merepresentasikan ideologi skeptisisme atau apatisisme sosial. Sikap ini berakar pada pengalaman ketidakpercayaan terhadap institusi atau efektivitas kebijakan, sehingga menghasilkan normalisasi terhadap masalah. Dalam kerangka Fairclough, wacana semacam ini berpotensi mereproduksi status quo karena menghambat dorongan perubahan.

Secara pragmatik, komentar ini tidak sekadar menyatakan pendapat, tetapi berfungsi sebagai delegitimasi terhadap optimisme, penolakan terhadap urgensi perubahan, serta normalisasi masalah sebagai sesuatu yang “biasa”. Dengan kata lain, jika kubu pro-lingkungan berusaha mengaktifkan kesadaran, maka kubu apatis justru meredamnya.

#### 2.4.4 Konstruksi Identitas: Bahasa sebagai Penanda Keanggotaan Sosial

Bahasa tidak hanya berfungsi untuk menyampaikan opini, tetapi juga menjadi sarana utama untuk menampilkan dan menegaskan identitas sosial penutur. Setiap komentar tidak berdiri sebagai pernyataan netral, melainkan memuat penanda keanggotaan, posisi sosial, dan relasi dengan isu yang dibahas. Dengan kata lain, ketika pengguna berbicara, mereka sekaligus menjawab pertanyaan implisit: “siapa saya dalam diskursus ini?”

Komentar “Sebagai warga Bali, saya sedih lihat ini” secara jelas menunjukkan konstruksi identitas berbasis keanggotaan lokal. Frasa “sebagai warga Bali” berfungsi sebagai penanda eksplisit yang menempatkan penutur sebagai bagian dari komunitas yang terdampak langsung. Identitas ini memberi legitimasi pada pernyataan yang disampaikan, karena pengalaman dianggap bersifat personal dan otentik. Ekspresi “sedih” memperkuat dimensi afektif, sehingga identitas tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga emosional. Dengan demikian, penutur tidak hanya menyampaikan kritik, tetapi juga membangun posisi sebagai insider yang memiliki keterikatan moral dan emosional terhadap Bali.

Berbeda dengan itu, komentar “Kita harus lebih kritis terhadap kebijakan pemerintah” merepresentasikan identitas yang bersifat kolektif dan normatif. Penggunaan kata “kita” membentuk komunitas imajiner yang inklusif. Penggunaan kata ganti “kita” mengajak pembaca untuk menjadi bagian dari kelompok yang sama. Identitas yang dibangun bukan berdasarkan asal geografis, melainkan berdasarkan nilai dan sikap, yaitu sebagai warga yang kritis dan sadar. Dalam hal ini, bahasa berfungsi sebagai alat untuk membangun solidaritas sekaligus menetapkan standar perilaku sosial. Penutur memosisikan diri sebagai bagian dari kelompok yang memiliki kesadaran lebih tinggi, sehingga secara implisit juga membedakan diri dari pihak yang dianggap kurang kritis.

Sementara itu, komentar “Saya bukan orang Bali, tapi sering ke sana dan kondisi ini memprihatinkan” menunjukkan konstruksi identitas sebagai pengamat eksternal. Frasa “bukan orang Bali” berfungsi sebagai penanda jarak sosial, yang sekaligus menjadi bentuk kehati-hatian dalam berbicara. Namun, klausa “sering ke sana” digunakan untuk membangun legitimasi pengalaman, sehingga penutur tetap memiliki dasar untuk berpendapat. Identitas yang muncul di sini bersifat ambivalen: tidak sepenuhnya bagian dari komunitas, tetapi juga tidak sepenuhnya di luar. Posisi ini memungkinkan penutur untuk tampil sebagai pengamat yang relatif objektif, meskipun tetap membawa perspektif luar dalam menilai kondisi yang ada.

Berdasar pada ketiga data tersebut terlihat bahwa identitas dalam komunikasi digital dibangun melalui strategi linguistik yang berbeda-beda, seperti: penggunaan frasa pembuka (“sebagai warga Bali”, “saya bukan orang Bali”), pemilihan pronomina (“kita”), serta ekspresi evaluatif yang menunjukkan keterlibatan emosional atau posisi nilai. Identitas tidak bersifat tetap, melainkan dikonstruksi secara situasional sesuai dengan tujuan komunikatif penutur. Dalam satu konteks, seseorang dapat menampilkan diri sebagai warga lokal, sementara dalam konteks lain sebagai pengamat atau bagian dari komunitas yang lebih luas.

Secara deskriptif, fenomena ini menunjukkan bahwa diskursus media sosial bukan hanya ruang pertukaran informasi, tetapi juga ruang performansi identitas, di mana pengguna secara aktif menegaskan keanggotaan sosialnya, membangun legitimasi untuk berbicara, serta memposisikan diri dalam relasi dengan pengguna lain. Dengan demikian, bahasa dalam diskursus digital berfungsi ganda: tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai mekanisme utama dalam membangun, menampilkan, dan menegosiasikan identitas sosial.

### 3. PENUTUP

#### Simpulan

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa diskursus digital mengenai isu sampah di Bali menunjukkan bahwa makna tidak bersifat tunggal maupun stabil, melainkan dibangun dan dinegosiasikan secara dinamis melalui interaksi antar pengguna media sosial. Makna tidak terletak pada teks semata, tetapi terbentuk melalui hubungan antara ujaran, konteks visual, serta proses inferensi yang dilakukan oleh pembaca. Fenomena ini menegaskan karakter komunikasi digital yang bersifat *underdetermined*, di mana interpretasi selalu terbuka dan bergantung pada partisipasi aktif pengguna.

Lebih lanjut, strategi pragmatik seperti implikatur, ironi, sarkasme, dan ketidaksantunan berbahasa menjadi perangkat utama dalam membangun dan menyampaikan makna. Implikatur memungkinkan kritik disampaikan secara tidak langsung, sementara ironi dan sarkasme berfungsi sebagai bentuk ekspresi evaluatif yang tajam terhadap realitas sosial. Di sisi lain, ketidaksantunan berbahasa tidak semata-mata merupakan pelanggaran norma linguistik, tetapi juga berfungsi sebagai strategi komunikatif untuk mengekspresikan emosi, melakukan kritik sosial, serta mendelegitimasi pihak tertentu.

Analisis juga menunjukkan bahwa praktik (ketidak)santunan dalam ruang digital berkaitan erat dengan relasi kuasa dan ideologi. Bahasa digunakan sebagai alat untuk menegaskan posisi, melakukan resistensi, serta membentuk opini publik. Ketidaksantunan, dalam konteks tertentu, justru berfungsi sebagai sarana kritik sosial dan solidaritas kelompok, sehingga batas antara santun dan tidak santun menjadi semakin cair dalam komunikasi digital.

Dalam perspektif Analisis Wacana Kritis dari Norman Fairclough, diskursus ini memperlihatkan bahwa bahasa tidak hanya merefleksikan realitas, tetapi juga berperan aktif dalam membentuknya. Relasi kuasa, ideologi, dan identitas sosial termanifestasi melalui pilihan bahasa, struktur wacana, serta strategi komunikasi yang digunakan oleh pengguna media sosial. Dengan demikian, ruang digital menjadi arena kontestasi makna,

di mana berbagai interpretasi saling berhadapan, bernegosiasi, dan bersaing untuk menjadi dominan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa analisis cyberpragmatics yang dikombinasikan dengan teori implikatur, (ketidak)santunan, dan CDA mampu mengungkap kompleksitas makna dalam komunikasi digital. Diskursus tentang sampah di Bali tidak hanya mencerminkan persoalan lingkungan, tetapi juga menjadi medium bagi ekspresi kritik, negosiasi makna, serta pertarungan ideologi dalam masyarakat digital kontemporer.

## Daftar Pustaka

- Alharbi, A., & Mahzari, M. (2023). The pragmatic functions of emojis in Arabic tweets. *Frontiers in Psychology*, February, 1-14. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.1059672>
- Barbieri, F., Ballesteros, M., Ronzano, F., Saggion, H., Scale, L., Understanding, T., Biomedical, I., & Group, I. (2017). *Multimodal Emoji Prediction*.
- Boukhelif, N., Abdelhadi, A., & Sahli, N. (2023). JOURNAL OF LANGUAGE Relevance Maxim Violation And Conversational Implicature In Online Humorous Discourse. *JOURNAL OF LANGUAGE AND LINGUISTIC STUDIES*, 19(4), 98-105.
- Boxman-shabtai, L., & Boxman-shabtai, L. (2024). The marketplace of interpretations : a method to trace diversity in digital interpretive traces diversity in digital interpretive traces. *Information, Communication & Society*, 4462, 2191-2209. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2023.2291461>
- Cao, F., & Yu, V. R. (2024). Face Attack Online : Unpacking Conflicts in Multimodal Group Chats. *Journalism and Media*, 1297-1315.
- Carey Jewit, Jeff Bezemer, K. O. (2025). *Introducing Multimodality*. Taylor & Francis.
- Culpeper, J. (1996). Towards an anatomy of impoliteness. *Journal of Pragmatics*, 25(April 1994), 349-367.
- Culpeper, J., & Tantucci, V. (2021). The Principle of ( Im ) politeness Reciprocity. *Journal of Pragmatics*, 175, 146-164. <https://doi.org/10.1016/j.pragma.2021.01.008>
- Dahlman, R. C. (2022). *The Non-saying of What Should Have Been Said.pdf*.
- David Tomás, Reynier Ortega-Bueno, Guobiao Zhang, Paolo Rosso, R. S. (n.d.). Transformer-based models for multimodal irony detection.pdf. *Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing*.
- Demirkol, N. (2014). Direct-Indirect Impoliteness and Power Struggles in Harold Pinter ' s Plays. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 158, 370-376. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.12.102>
- Dijk, T. A. Van. (n.d.). *Discourse, Ideology and Context*. 2(C), 11-41.
- Du, Y., Yuan, Y., Wang, C., Zou, B., He, H., & Jia, K. (2026). Telematics and Informatics Was this person being ironic ? The role of emojis in irony comprehension and memory in computer-mediated communication : insights from the UK and China. *Telematics and Informatics*, 106(February), 102390. <https://doi.org/10.1016/j.tele.2026.102390>
- Dynel, M. (2021). Desperately seeking intentions : Genuine and jocular insults on social media. *Journal of Pragmatics*, 179, 26-36. <https://doi.org/10.1016/j.pragma.2021.04.017>
- Esteve-del-valle, M. (2025). Social Media , Political Polarization , and Climate Change : A

- Systematic Literature Review. *Review Of Communication Research*, 13, 106-121.
- Fahri, M., Sudding, J., Amin, F. H., & Sunusi, S. L. (2025). Patterns of Conversational Implicature in Indonesian Influencers' Apology and Clarification Videos on Digital Technology Platforms. *Journal of Language Teaching Innovation*, 2(2), 91-102.
- Fairclough, N. (1989). *Language and power*. London: Longman.
- Fairclough, N. (1992). *Discourse and social change*. Cambridge: Polity Press.
- Fairclough, N. (1995). *Critical discourse analysis: The critical study of language*. London: Longman.
- Fathi, S. (2024). Revisiting Brown and Levinson's Theory of Politeness. *European Journal of Language and Culture Studies*, 3(5), 1-11.
- Fegasanti, P. A., Pratama, H., & Wahyuni, S. (2025). Pragmatic Analysis of Maxims Flouting Contained in PunHubOnline Memes on Instagram. *English Education Journal*, 15(1), 1-11.
- Garassino, D., Brocca, N., & Masia, V. (2022). Is implicit communication quanti fi able ? A corpus-based analysis of British and Italian political tweets. *Journal of Pragmatics*, 194, 9-22. <https://doi.org/10.1016/j.pragma.2022.03.024>
- Giyatmi 1 , Sihindun Arumi 2, R. W. 3. (2025). Irony as Social Criticism in Instagram Comments: A Study on "Liga Korupsi Indonesia." *EJI (English Journal of Indragiri): Studies in Education, Literature, and Linguistics*, 9(2), 524-544.
- Gotzner, N. (2019). The role of focus intonation in implicature computation : a comparison with only and also. *Natural Language Semantics*, 27(3), 189-226. <https://doi.org/10.1007/s11050-019-09154-7>
- Guillemot, F. (2024). *Teachers' non- - response bias in questionnaires about their attitude towards inclusive education. November 2023*, 1-11. <https://doi.org/10.1111/1471-3802.12726>
- Hall, A., & Mazzarella, D. (2023). Pragmatic inference , levels of meaning and speaker accountability. *Journal of Pragmatics*, 205, 92-110. <https://doi.org/10.1016/j.pragma.2022.12.007>
- Hand, C. J. (2023). Emoji Alter the Perception of Emotion in Affectively Neutral Text messages. *Journal of Nonverbal Behavior*, 83-97. <https://doi.org/10.1007/s10919-022-00421-6>
- Hee, C. Van. (2018). Exploring the fine-grained analysis and automatic detection of irony on Twitter. *Lang Resources & Evaluation*, 707-731. <https://doi.org/10.1007/s10579-018-9414-2>
- Id, T. H., & Robinson, C. (2020). Emoji can facilitate recognition of conveyed indirect meaning. *PLOS ONE*, 1-13. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0232361>
- Jacobs, N. C. L., Völlink, T., Dehue, F., & Lechner, L. (2014). Online Pestkoppentoppen : systematic and theory-based development of a web-based tailored intervention for adolescent cyberbully victims to combat and prevent cyberbullying. *BMC Public Health*, 1-16.
- Khosravini, M. (2022). Digital meaning-making across content and practice in social media critical discourse studies. *Critical Discourse Studies*, 5904. <https://doi.org/10.1080/17405904.2020.1835683>
- Lazzeretti, C. (2026). *Emoji in dialogue with images A multimodal social semiotic approach*. 1(September 2025), 8-29.
- Mannheim, C., & Juliane, V. (2021). Tuned in on senders' self-revelation : Emojis and emotional intelligence in fl uence interpretation of WhatsApp messages. *Computers in Human Behavior Reports Journal*, 3(November 2020).

<https://doi.org/10.1016/j.chbr.2021.100062>

- María, J., & Gil. (2012). Face-Threatening Speech Acts and Face-Invading Speech Acts : An Interpretation of Politeness Phenomena. *International Journal of Linguistics*, 4(2), 400-411. <https://doi.org/10.5296/ijl.v4i2.1858>
- Masroor, F., Khan, Q. N., Aib, I., & Ali, Z. (2019). Polarization and Ideological Weaving in Twitter Discourse of Politicians. *Social Media + Society*. <https://doi.org/10.1177/2056305119891220>
- Nikabadze, M. (2024). The Socio-Pragmatic Function of Irony on Social Media ( Using Examples from Johan Deckman ' S Art Pictures on Instagram ). *Online Journal of Humanities ETAGTSU, Ix*, 1-14.
- Noor, A. (2025). Speech Acts and Politeness Strategies in Online Communication : A Pragmatic Analysis of Social Media Interaction ; A Review Study. *JOURNAL OF APPLIED LINGUISTICS AND TESOL*, 8(1), 641-646.
- Pasternak, R. (2025). Experimental evidence for a semantic typology of emoji : Inferences of co- , pro- , and post-text emoji. *QJEP: Quarterly Journal of Experimental Psychology*. <https://doi.org/10.1177/17470218241255786>
- Peyrard, M., Mentha, Y., Bie, M., Grütter, A., Auer, A., Xanthos, A., & West, R. (2015). *On the Context-Free Ambiguity of Emoji* .
- Pragmatic, A. (2025). e-Journal of Linguistics Digital Sarcasm as Social Critique : *E-Journal of Linguistics*, 19(2), 97-107.
- Putri, S. A., Adinda, M., Sabila, S., & Hasibuan, F. (2026). Types and Functions of Sarcasm in Indonesian Political Conversation on ' X . ' *Lexeme : Journal of Linguistics and Applied Linguistics Vol.*, 8(1), 39-48.
- Rathnayake, C., & Suthers, D. (2025). Towards a ' pluralist ' approach for examining structures of interwoven multimodal discourse on social media. *New Media & Society*. <https://doi.org/10.1177/14614448231189800>
- Sapitri, P. A., Chasanah, A., Putri, A. A., & Paulima, J. (2019). Exploring Brown and Levinson ' s Politeness Strategies : An Explanation on the Nature of the Politeness Phenomenon. *Journal of Research and Innovation in Language*, 1(3), 111-117.
- Saz-rubio, M. M. (2023). Assessing impoliteness-related language in response to a season ' s greeting posted by the Spanish and English Prime Ministers on Twitter. *Journal of Pragmatics*, 206, 31-55. <https://doi.org/10.1016/j.pragma.2023.01.010>
- Sha, Y., & Brookes, G. (2026). Discourse , Context & Media Multimodal irony in public responses to digitally mediated NHS COVID-19 messaging. *Discourse, Context & Media*, 70(February), 100976. <https://doi.org/10.1016/j.dcm.2026.100976>
- Uyheng, J., & Carley, K. M. (2020). *Affective Polarization in Online Climate Change Discourse on Twitter*.
- Yus, F. (2011). *Cyberpragmatics*. John Benjamins Publishing Company Amsterdam / Philadelphia.
- Zakkou, J. (2025). Entailed conversational implicatures. *Synthese*, 1-24.
- Zappavigna, M., & Logi, L. (2025). How emoji make meaning and enact ambient affiliation : a social semiotic account of emoji-text relations in TikTok comments. *Social Semiotics*, 35(4), 617-637. <https://doi.org/10.1080/10350330.2024.2389520>

